

KATALOG : 4102002.7315

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA



KABUPATEN PINRANG

2023



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN PINRANG**

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA



KABUPATEN PINRANG

2023





Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Pinrang 2023

ISSN : 2797-2798
No. Publikasi : 73150.24003
Katalog : 4102002.7315
Ukuran Buku : 15 cm x 21 cm
Jumlah Halaman : xiv + 77

Naskah

Badan Pusat Statistik Kabupaten Pinrang

Gambar Kulit

Badan Pusat Statistik Kabupaten Pinrang

Diterbitkan Oleh

Badan Pusat Statistik Kabupaten Pinrang

Dicetak Oleh

Badan Pusat Statistik Kabupaten Pinrang

Sumber Ilustrasi

www.freepik.com

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA
KABUPATEN PINRANG
2023

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik.



TIM PENYUSUN

**INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA
KABUPATEN PINRANG
2023**

Pengarah

Joko Siswanto, S.ST

Penanggung Jawab

Sunarti, S.Si

Editor

Sunarti, S.Si

Penulis

Kiki Riska Amilia, S.E

Desain Cover dan Layout

Kiki Riska Amilia, S.E

Nurfadhilah Muin, S.ST

Kata Pengantar

Publikasi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Pinrang Tahun 2023 ini merupakan salah satu tolak ukur kinerja secara keseluruhan. Memberikan gambaran umum, metodologi, perkembangan IPM di Kabupaten Pinrang, disparitas pembangunan dari berbagai aspek dan isu terkait daya beli masyarakat.

Ada tiga pilihan paling mendasar pada pembangunan manusia yaitu dimensi kesehatan direpresentasikan dalam indikator Umur Harapan Hidup (UHH), dimensi pengetahuan oleh indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS), serta dimensi kehidupan yang layak direpresentasikan oleh Pengeluaran Per kapita Disesuaikan (PPP). Keseluruhan indikator diatas dirangkum dalam suatu nilai tunggal yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Semoga apa yang disampaikan pada publikasi ini dapat memberi nilai positif bagi setiap pengguna data dan mampu memperkaya khazanah pustaka BPS. Berbagai saran dan masukan sangat diharapkan demi edisi yang lebih baik. Serta, kepada semua pihak yang telah berkontribusi pada penyusunan publikasi ini kami ucapkan terimakasih.

Pinrang, Maret 2024
Kepala BPS Kabupaten Pinrang



Joko Siswanto, SST



Daftar Singkatan

ABH	: Angka Buta Huruf
ADHB	: Atas Dasar Harga Berlaku
ADHK	: Atas Dasar Harga Konstan
AMH	: Angka Melek Huruf
APS	: Angka Partisipasi Sekolah
BOS	: Bantuan Operasional Sekolah
CPR	: <i>Contraceptive Prevalence Rate</i>
EYS	: <i>Expected Years of Schooling</i>
GNP	: <i>Gross National Product</i>
HDI	: <i>Human Development Index</i>
HDR	: <i>Human Development Report</i>
HLS	: Harapan Lama Sekolah
IPM	: Indeks Pembangunan Manusia
MDGs	: <i>Millenium Development Goals</i>
SDGs	: <i>Sustainable Development Goals</i>
MYS	: <i>Mean Years of Schooling</i>
PDRB	: Produk Domestik Regional Bruto
PNB	: Produk Nasional Bruto
PPP	: <i>Purchasing Power Parity</i>
PUS	: Pasangan Usia Subur
PUSTU	: Puskesmas Pembantu
RLS	: Rata-rata Lama Sekolah
SD	: Sekolah Dasar

MI	: Madrasah Ibtidaiyah
SMP	: Sekolah Menengah Pertama
MTS	: Madrasah Tsanawiyah
SMA	: Sekolah Menengah Atas
SMK	: Sekolah Menengah Kejuruan
MA	: Madrasah Aliyah
SUSENAS	: Survei Sosial Ekonomi Nasional
TPT	: Tingkat Pengangguran Terbuka
UHH	: Umur Harapan Hidup
UNDP	: <i>United Nations Development Programme</i>
UUD	: Undang-Undang Dasar

Daftar Isi

Halaman

Kata Pengantar	v
Daftar Singkatan.....	vi
Daftar Isi	viii
Daftar Gambar	x
Daftar Tabel	xii
Daftar Lampiran	xii
Bab 1 Pendahuluan.....	1
1.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	5
1.2 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Metode Baru	9
Bab 2 Variabel Terkait IPM.....	15
2.1 Kependudukan	16
2.2 Pendidikan.....	18
2.2.1 Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah .	30
2.3 Kesehatan.....	34
2.3.1 Harapan Hidup	36
2.3.2 Keluarga Berencana	41
2.3.3 Pemberian ASI	44
2.4 Pengeluaran Per kapita.....	44
Bab 3 Indeks Pembangunan Manusia.....	49
3.1 Sumber Data	51
3.2 Manfaat IPM	52
3.3 Komponen Indeks Pembangunan Manusia.....	52
3.3.1 Indeks Kesehatan	52

3.3.2 Indeks Pengetahuan	53
3.3.3 Indeks Pengeluaran.....	55
3.4 Gambaran Pencapaian Pembangunan Manusia Kabupaten Pinrang	60
Daftar Istilah Statistik	68
Daftar Pustaka	74
Daftar Lampiran	74

<https://pinrangkab.bps.go.id>



Daftar Gambar

Halaman

Gambar 1	Diagram Hitung IPM	13
Gambar 2	Persentase Penduduk Kabupaten Pinrang Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2023	18
Gambar 3	Angka Partisipasi Sekolah Kabupaten Pinrang 2020-2023	19
Gambar 4	Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Pinrang dan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020-2023...	31
Gambar 5	Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Penduduk Umur 25 Tahun Keatas Kabupaten Pinrang dan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020-2023	32
Gambar 6	Selisih Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Pinrang dengan Provinsi Sulawesi Selatan, 2020-2023 (Tahun)	33
Gambar 7	Persentase Rumah Tangga Menurut Karakteristik dan Tempat Pembuangan Akhir Tinja, 2023	35
Gambar 8	Persentase rumah tangga menurut sumber air utama untuk mandi/cuci/dll, 2023	36
Gambar 9	Umur Harapan Hidup Penduduk Kabupaten Pinrang Tahun 2020-2023	37

Gambar 10	Banyaknya Dokter Spesialis, Dokter Umum dan Dokter Gigi di Kabupaten Pinrang Tahun 2023.....	41
Gambar 11	Jumlah peserta KB Aktif Menurut Jenis Alat KB, Tahun 2023.....	43
Gambar 12	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Pinrang Tahun 2020-2023	45
Gambar 13	Pengeluaran Per kapita disesuaikan Pertahun Kabupaten Pinrang Tahun 2020-2023 (dalam ribuan rupiah)	47
Gambar 14	IPM Kabupaten Pinrang 2020-2023	61
Gambar 15	IPM Sulawesi Selatan Menurut Kabupaten/Kota dan Status Pembangunan Manusia Tahun 2023...	62
Gambar 16	Indeks Pembangunan Manusia dan Pertumbuhannya Kabupaten/Kota Wilayah Ajatappareng Tahun 2023	63
Gambar 17	Tren dan Pertumbuhan IPM Pinrang Tahun 2020-2023	67



Daftar Tabel

Halaman

Tabel 1	Persentase Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Pinrang Tahun 2020-2023.....	16
Tabel 2	Banyaknya Sekolah, Guru, Murid Tingkat Pendidikan SD Menurut Kecamatan di Kabupaten Pinrang Tahun Ajaran 2023/2024	23
Tabel 3	Banyaknya Sekolah, Guru, Murid Tingkat Pendidikan MI Menurut Kecamatan di Kabupaten Pinrang Tahun Ajaran 2023/2024	24
Tabel 4	Banyaknya Sekolah, Guru, Murid Tingkat Pendidikan SMP Menurut Kecamatan di Kabupaten Pinrang Tahun Ajaran 2023/2024	25
Tabel 5	Banyaknya Sekolah, Guru, Murid Tingkat Pendidikan MTs Menurut Kecamatan di Kabupaten Pinrang Tahun Ajaran 2023/2024	26
Tabel 6	Banyaknya Sekolah, Guru, Murid Tingkat Pendidikan SMA/SMK Menurut Kecamatan di Kabupaten Pinrang Tahun Ajaran 2023/2024	28

Tabel 7	Banyaknya Sekolah, Guru, Murid Tingkat Pendidikan MA Menurut Kecamatan di Kabupaten Pinrang Tahun Ajaran 2023/2024	29
Tabel 8	Banyaknya Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Pinrang Tahun 2023.....	38
Tabel 9	Banyaknya Tenaga Kesehatan Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Pinrang Tahun 2023	40
Tabel 10	Dimensi, Indikator dan Indeks Dimensi Pembangunan Manusia	51
Tabel 11	Komoditi Kebutuhan Pokok Dasar Penghitungan Daya Beli	57
Tabel 12	Nilai Maksimum dan Minimum dari Setiap Komponen IPM	58
Tabel 13	Kriteria Tingkatan Status Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	59
Tabel 14	IPM Kabupaten Pinrang dan Komponen, 2020-2023.....	60
Tabel 15	IPM Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan, Tahun 2023	64



Daftar Lampiran

Halaman

Lampiran 1	<i>Relative Standard Error (RSE)</i> Angka Partisipasi Sekolah (APS) dan Angka Partisipasi Murni (APM) Penduduk menurut Karakteristik dan Jenis Kelamin, 2023.....	75
Lampiran 2	<i>Relative Standard Error (RSE)</i> Angka Morbiditas menurut Karakteristik, 2023	76
Lampiran 3	<i>Relative Standard Error (RSE)</i> Persentase Rumah Tangga menurut Karakteristik dan Sumber Air Utama yang Digunakan Rumah Tangga untuk Mandi/Cuci/Dll, 202	76
Lampiran 4	<i>Relative Standard Error (RSE)</i> Persentase Rumah Tangga menurut Karakteristik dan Tempat Pembuangan Akhir Tinja, 2023	77

1

PENDAHULUAN





Sejatinya pembangunan di Indonesia sudah dilakukan dari jaman sebelum kemerdekaan walaupun pada saat itu pembangunan masih dikontrol oleh penjajah. Namun, pembangunan yang terstruktur dan berkesinambungan baru dimulai periode tahun 1970-an. Pembangunan di berbagai bidang terus dilakukan diantaranya di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan sebagainya. Berbagai pemberitaan tentang pembangunan di Indonesia terus di kabarkan ke pelosok negeri. Akan tetapi, apakah pembangunan yang selama ini telah mencerminkan pembangunan yang sebenarnya?

Pembangunan yang baik adalah pembangunan yang berorientasi pada manusia, artinya manusialah yang menjadi tujuan akhir dari pembangunan tersebut. Sejarah mencatat sampai tahun 1999 masih diterapkannya sistem sentralistik. Segala perencanaan sampai evaluasi pembangunan di Indonesia pun juga dilakukan secara terpusat. Namun, sejak diberlakukannya Undang-undang No. 2 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dan diperbaharui dengan Undang-undang No. 32 Tahun 2004, pembangunan dilakukan dengan sistem desentralisasi dimulai.

Sistem desentralisasi lebih dikenal dengan istilah otonomi daerah. Sistem ini menuntut pemerintah daerah lebih pro-aktif dalam upaya pembangunan sesuai dengan realitas yang ada yaitu sesuai dengan kebutuhan daerahnya masing-masing dan tentunya mengutamakan kesejahteraan rakyat.

Dewasa ini dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan seluruh rakyat maka perencanaan pembangunan hendaknya tidak hanya mengedepankan pembangunan di bidang ekonomi ataupun pemenuhan sarana dan prasarana saja, melainkan juga harus melibatkan aspek manusia di dalamnya. Untuk dapat berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan dibutuhkan masyarakat Indonesia yang unggul dari segi SDA dan SDM-nya.

Pembangunan manusia adalah suatu proses untuk memperbanyak pilihan-pilihan yang dimiliki oleh manusia. Diantara banyak pilihan tersebut, pilihan yang terpenting adalah untuk berumur panjang dan sehat, untuk berilmu pengetahuan, dan untuk mempunyai akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan agar dapat hidup secara layak. Pembangunan manusia yang hakiki pada dasarnya ialah mampu menciptakan kebebasan. Kebebasan yang dimaksud ialah rakyat mampu memilih apa yang mereka inginkan dan mampu menjalani kehidupan secara mandiri.

Untuk menghindari kekeliruan dalam memaknai konsep di atas, perbedaan antara cara pandang pembangunan manusia terhadap pembangunan dengan pendekatan konvensional yang menekankan pertumbuhan ekonomi, pembentukan modal manusia, pembangunan sumber daya manusia, kesejahteraan rakyat, dan pemenuhan kebutuhan dasar, perlu diperjelas. Konsep pembangunan manusia mempunyai cakupan yang lebih luas dari teori konvensional pembangunan ekonomi.

Model “pertumbuhan ekonomi” lebih menekankan pada peningkatan Produk Nasional Bruto daripada memperbaiki kualitas

hidup manusia. “Pembangunan sumber daya manusia” cenderung untuk memperlakukan manusia sebagai input dari proses produksi sebagai alat, bukan sebagai tujuan akhir. Pendekatan “kesejahteraan” melihat manusia sebagai penerima dan bukan sebagai agen perubahan dalam proses pembangunan. Adapun pendekatan “kebutuhan dasar” terfokus pada penyediaan barang dan jasa untuk kelompok masyarakat tertinggal, bukannya memperluas pilihan yang dimiliki manusia di segala bidang.

Pendekatan pembangunan manusia menggabungkan aspek produksi dan distribusi komoditas, serta peningkatan dan pemanfaatan kemampuan manusia. Pembangunan manusia melihat secara bersamaan semua isu dalam masyarakat pertumbuhan ekonomi, perdagangan, ketenagakerjaan, kebebasan politik ataupun nilai-nilai kultural dari sudut pandang manusia. Pembangunan manusia juga mencakup isu penting lainnya, yaitu *gender*. Dengan demikian, pembangunan manusia tidak hanya memperhatikan sektor sosial, tetapi merupakan pendekatan yang komprehensif dari semua sektor. Pembangunan manusia merupakan perwujudan jangka panjang yang meletakkan pembangunan di sekeliling manusia, dan bukan manusia di sekeliling pembangunan.

Isu yang hangat mengenai ekonomi Indonesia secara khusus maupun ASEAN secara umum adalah mulai diberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2017. Oleh karenanya kualitas manusia sangatlah penting disini sebagai modal dasar pembangunan dan menghadapi persaingan di era globalisasi. Pola pikir inilah yang harus dipegang untuk menempatkan manusia sebagai tujuan akhir

pembangunan. Cara pandang inilah yang memungkinkan pemerintah dapat memenuhi hak-hak warga negara secara tepat.

Sumber daya manusia tidak hanya dilihat dari kuantitas tetapi juga harus diperhatikan aspek kualitas. Sejauh ini pemerintah telah melakukan berbagai usaha untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia, melingkupi aspek kesehatan, pendidikan, pendapatan (daya beli) maupun aspek moralitas. Tak dipungkiri berbagai upaya tersebut semata-mata untuk mencapai tujuan utama yaitu menciptakan manusia Indonesia yang berkualitas.

1.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Menarik sejarah ke belakang yaitu sebelum tahun 1970-an, dalam upaya evaluasi pemerintah hanya melihat keberhasilan pembangunan berdasarkan pertumbuhan *Gross National Product* (GNP) baik secara total maupun per kapita. Memang benar terjadi peningkatan tetapi pada kenyataannya pertumbuhan dari keberhasilan pembangunan berbanding lurus dengan taraf hidup masyarakat. Oleh karena itu, dikarenakan kesadaran bahwa pembangunan bukan perkara mudah karena mencakup segi-segi kehidupan yang kompleks, maka diperlukan indikator yang dapat mencerminkan keberhasilan pembangunan manusia. Alat ukur inilah yang dikenal dengan IPM.

Konsep inilah yang digunakan untuk mengukur keberhasilan suatu negara maupun wilayah tertentu yang pembangunannya tidak hanya ditandai oleh tinggi rendahnya tingkat pertumbuhan ekonomi

melainkan juga mencakup pula kualitas manusianya. Kondisi inilah yang menjadi tantangan semua pihak untuk menyelaraskan antara pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas manusia.

Secara sederhana IPM adalah indikator yang menjelaskan bagaimana penduduk/masyarakat dapat mengakses hasil-hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. Di dalam pembangunan manusia fokus utama pastilah manusia itu sendiri, oleh karenanya IPM bermanfaat untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). Bahkan secara internasional, IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah atau negara. Terlebih khusus bagi negara Indonesia, IPM dijadikan data yang sangat amat strategis karena selain sebagai ukuran kinerja pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator bagi Dana Alokasi Umum (DAU) tingkat provinsi/kabupaten/kota.

Secara konseptual IPM adalah alat untuk mengukur pencapaian pembangunan manusia dari suatu wilayah yang terdiri dari tiga dimensi dasar pembangunan manusia, yaitu umur panjang dan hidup sehat (*long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*) serta standar hidup layak (*a decent standard of living*). Ketiganya diukur dengan Umur Harapan Hidup, pencapaian pendidikan dan pendapatan per kapita yang telah disesuaikan menjadi paritas daya beli. IPM adalah suatu ringkasan dan bukan suatu ukuran komprehensif dari pembangunan manusia. Meskipun tidak mengukur semua dimensi dari

pembangunan manusia, tetapi IPM dinilai mampu mengukur dimensi pokok dari pembangunan manusia.

<https://pinrangkab.bps.go.id>

Paradigma Pembangunan Manusia Terdiri dari 4 Komponen Utama:

- 1. Produktivitas** “Masyarakat harus dapat meningkatkan produksi mereka dan berpartisipasi secara penuh dalam proses memperoleh penghasilan dan pekerjaan berupah. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi adalah salah satu bagian dari jenis pembangunan manusia”.
- 2. Pemerataan** “Masyarakat harus punya akses untuk memperoleh kesempatan yang adil. Semua hambatan terhadap peluang ekonomi dan politik harus dihapus agar masyarakat dapat berpartisipasi di dalam dan memperoleh manfaat dari kesempatan-kesempatan ini”.
- 3. Kestinambungan** “Akses untuk memperoleh kesempatan harus dipastikan tidak hanya untuk generasi sekarang tapi juga generasi yang akan datang. Segala bentuk pemodalanan fisik, manusia, dan lingkungan hidup harus dilengkapi”.
- 4. Pemberdayaan** “Pembangunan harus dilakukan oleh masyarakat, dan bukan hanya untuk mereka. Masyarakat harus berpartisipasi penuh dalam mengambil keputusan dan proses-proses yang mempengaruhi kehidupan mereka”.

Sumber: Laporan Pembangunan Manusia Indonesia 1995

1.2 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Metode Baru

Sejak pertama kali merilis IPM pada tahun 1990, UNDP menggunakan tiga dimensi pembentuk IPM. Ketiga dimensi ini merupakan pendekatan yang dipilih dalam penggambaran kualitas hidup manusia dan tidak mengalami perubahan hingga saat ini. Dimensi tersebut adalah:

- Umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*);
- Pengetahuan (*knowledge*);
- Standar hidup layak (*decent standard of living*)

Penghitungan IPM yang dilakukan di Indonesia mengacu pada ketiga dimensi tersebut. Ketika UNDP melakukan perubahan dan penyempurnaan metode penghitungan IPM, Indonesia juga turut mengadopsi metode tersebut dengan mengacu pada penyempurnaan yang dilakukan oleh UNDP. Penghitungan yang dilakukan sejak tahun 2015 hingga saat ini mengadopsi metodologi yang direvisi UNDP pada tahun 2014.

Kenapa Harus Menggunakan IPM Metode Baru?

Alasan yang dijadikan dasar perubahan metodologi penghitungan IPM, ialah:

- ✓ Beberapa indikator sudah tidak tepat lagi digunakan dalam penghitungan IPM, Angka Melek Huruf (AMH) sudah tidak

relevan dalam mengukur pendidikan secara utuh karena tidak dapat menggambarkan kualitas pendidikan seutuhnya. Selain itu, karena AMH di sebagian besar daerah sudah tinggi, sehingga tidak dapat membedakan tingkat pendidikan antar daerah dengan baik.

- ✓ Indikator Rata-rata Lama Sekolah (RLS) untuk penduduk 15 tahun keatas dirasa sudah tidak relevan lagi karena hanya mengukur kemampuan rata-rata lama sekolah dalam lingkup tamat SMA saja.
- ✓ Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita tidak dapat menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah.
- ✓ Penggunaan rumus rata-rata aritmatik dalam penghitungan IPM menggambarkan bahwa capaian yang rendah di suatu dimensi dapat ditutupi oleh capaian yang tinggi pada dimensi lain.

Apa Saja Keunggulan IPM Metode Baru?

IPM metode baru menggunakan indikator yang lebih tepat dan dapat membedakan dengan baik (diskriminatif), yaitu dengan cara:

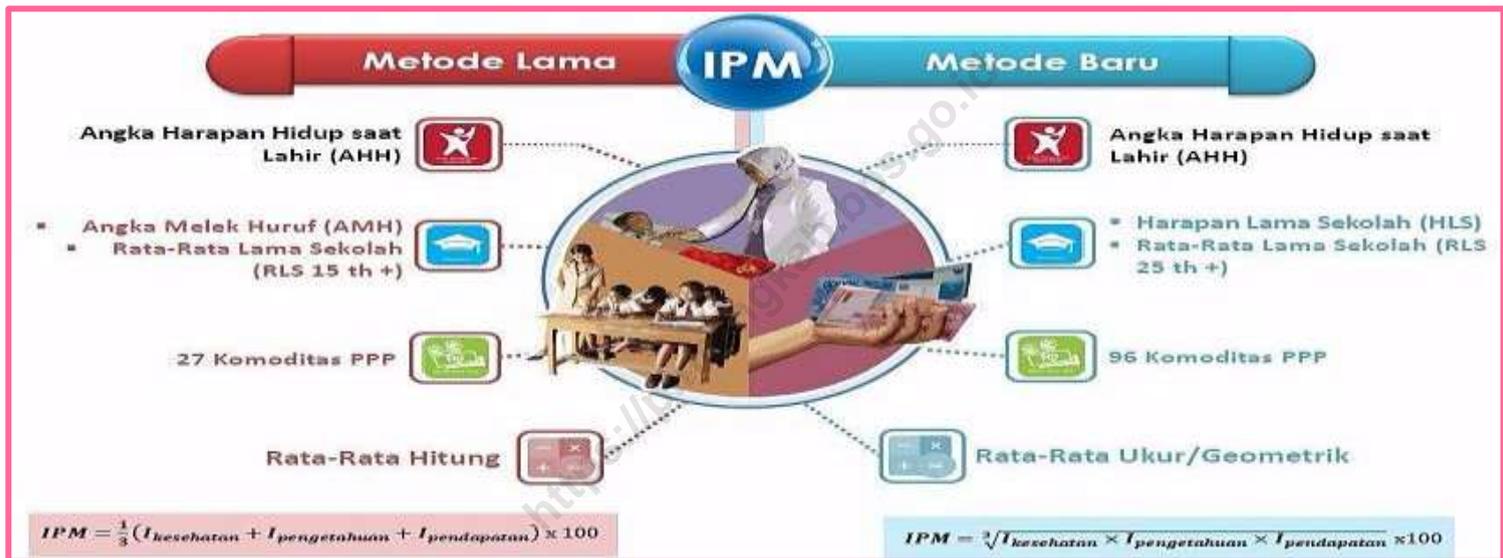
- Angka Melek Huruf (AMH) digantikan dengan indikator yang lebih sesuai dan tidak diskriminatif yaitu Harapan Lama

Sekolah (HLS) sehingga didapatkan gambaran yang relevan dalam pendidikan dan perubahan yang terjadi;

- Rata-rata Lama Sekolah (RLS) menggunakan 25 tahun keatas, karena diharapkan mampu mencerminkan kemampuan rata-rata penduduk menyelesaikan pendidikan formalnya. Diasumsikan bahwa kondisi normal rata-rata sekolah suatu wilayah tidak akan turun.
- PPP menggantikan PDB karena lebih menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah.
- Capaian yang rendah pada suatu komponen tidak bisa ditutupi oleh komponen lain yang capaiannya lebih tinggi karena menggunakan rata-rata geometrik, artinya untuk mewujudkan pembangunan manusia yang baik, ketiga dimensi harus memperoleh perhatian yang sama karena sama pentingnya.

“Peningkatan pembangunan manusia hendaknya tidak hanya memfokuskan pada komponen penyusun IPM saja, namun jauh dari itu perlu dikaji dan dipertimbangkan indikator-indikator lain yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi peningkatan komponen-komponen dalam IPM. Fokus dalam perbaikan kesehatan dan pendidikan baik langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi taraf kesejahteraan masyarakat, oleh karena itu perlu tindakan secara menyeluruh untuk membentuk juga manusia yang berkualitas”.

<https://pinrangkab.bps.go.id/>



Gambar 1. Diagram Hitung IPM

<https://pinrangkab.bps.go.id>



VARIABEL TERKAIT IPM



<https://ipinrangkab.bps.go.id>

2.1 Kependudukan

Jumlah penduduk Kabupaten Pinrang terus meningkat setiap tahun. Berdasarkan hasil proyeksi penduduk interim tahun 2023, penduduk Kabupaten Pinrang tercatat sebanyak 419.340 jiwa meningkat sebanyak 7.545 jiwa dari tahun 2022. Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Pinrang tahun 2023 sebesar 1,83 persen dengan kepadatan penduduk rata-rata adalah 214 jiwa per km².

Tabel 1. Persentase Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Pinrang Tahun 2022-2023

Kelompok Umur	2022			2023		
	L	P	L+P	L	P	L+P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
0 - 14	25,41	23,52	24,45	25,20	23,53	24,36
15 - 64	68,38	68,37	68,38	68,38	68,31	68,35
65 +	6,21	8,11	7,17	6,42	8,16	7,30
Total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS Pinrang, diolah

Seperti terlihat pada Tabel 1, komposisi penduduk di Kabupaten Pinrang didominasi oleh penduduk muda/dewasa. Pada tahun 2023, komposisi penduduk kelompok umur produktif (15-64 tahun) sebesar 68,35 persen, penduduk kelompok umur muda (0-14 tahun) sebesar 24,36 persen sementara penduduk kelompok umur tua (65+ tahun) sebesar 7,30 persen. Terlihat bahwa persentase penduduk kelompok umur 0-14 tahun dan umur 15-64 tahun

mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, sedangkan persentase penduduk kelompok umur 65 tahun keatas mengalami peningkatan.

Angka beban ketergantungan (*dependency ratio*) di Kabupaten Pinrang pada tahun 2023 sebesar 46,31 persen. Hal ini berarti dari setiap 100 penduduk umur produktif menanggung/membiayai hidup sekitar 46 hingga 47 penduduk umur tidak produktif. Peningkatan angka beban ketergantungan dibandingkan tahun 2022 (46,25 persen) menandakan bahwa beban penduduk kelompok umur produktif pada tahun 2023 semakin meningkat untuk membiayai penduduk tidak produktif.

Jika dilihat secara umum, maka persentase penduduk perempuan di Kabupaten Pinrang lebih banyak dibandingkan persentase penduduk laki-laki. Rasio jenis kelamin atau *sex ratio* penduduk Pinrang pada tahun 2023 adalah 97,86. Artinya, di setiap 100 orang penduduk perempuan, terdapat sekitar 97-98 penduduk laki-laki di Kabupaten Pinrang.

Berdasarkan gambar 2, terlihat bahwa persentase penduduk laki-laki berumur 0-14 tahun lebih tinggi (25,20 persen) daripada penduduk perempuan pada kelompok umur yang sama (23,53 persen). Demikian pula pada kelompok umur 15-64 tahun, persentase penduduk laki-laki lebih tinggi (68,38 persen) daripada penduduk perempuan pada kelompok umur yang sama (68,31 persen). Sementara itu, pada kelompok umur 65 tahun keatas persentase penduduk perempuan justru lebih tinggi daripada penduduk laki-laki.



Sumber: BPS Pinrang, diolah

Gambar 2. Persentase Penduduk Kabupaten Pinrang Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2023

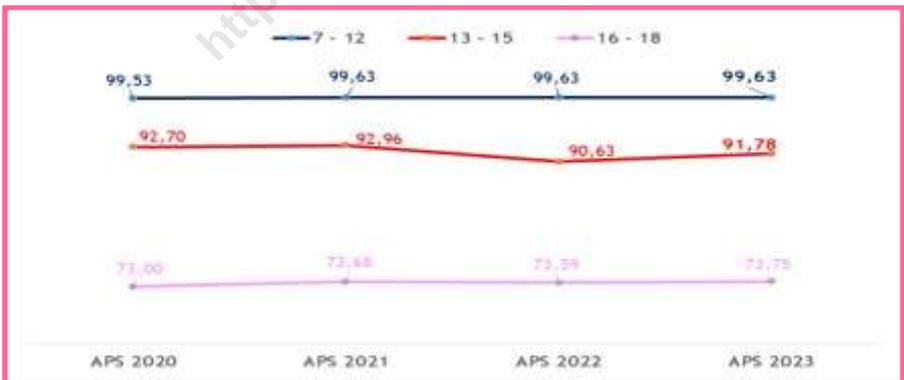
2.2 Pendidikan

Pembangunan yang diperlukan dewasa ini salah satunya adalah aspek pendidikan. Berbagai upaya dilakukan untuk meningkatkan pendidikan. Akan tetapi, masih terdapat berbagai kendala, diantaranya adalah faktor kemiskinan, geografis dan budaya. Terkadang, bagi keluarga yang tidak mampu menyekolahkan anak di pendidikan formal, hal ini terasa begitu memberatkan. Walaupun sudah ada program pemerintah yang memudahkan tercapainya pendidikan untuk semua, namun biaya pendidikan di luar sekolah formal masih sangat besar. Pola pikir inilah yang menyebabkan orang tua cenderung mengarahkan anaknya untuk bekerja dalam membantu perekonomian keluarga.

Selain itu, sebagian masyarakat menganggap bahwa pendidikan tidak akan menjamin perbaikan taraf hidup. Padahal, proses pendidikan tidak akan merubah taraf hidup secara instan karena proses di dalamnya yang akan membentuk kepribadian

seseorang untuk dapat meningkatkan kualitas hidupnya. Secara ideal, dalam proses pembangunan cakupan pendidikan formal mengalami perluasan. Artinya, terjadi peningkatan kapabilitas dasar penduduk di bidang pendidikan. Program-program pemerintah seperti pemberantasan buta aksara, pemberian dana operasional sekolah atau BOS, serta menjamin keberlangsungan program wajib belajar 9 tahun terus diselenggarakan.

Pemerataan akses terhadap pendidikan dapat dilihat dari Angka Partisipasi Sekolah (APS). Gambar 3 menunjukkan capaian APS dalam kurun waktu 4 tahun terakhir. Tahun 2021-2023, APS pada kelompok umur 7-12 tahun tercatat 99,63 yang artinya dari setiap 100 anak berusia 7-12 tahun, terdapat 99 sampai 100 anak yang masih bersekolah dapat diartikan juga telah terjadi pemerataan kesempatan pendidikan untuk anak kelompok umur 7-12 tahun.



Sumber: BPS Pinrang

Gambar 3. Angka Partisipasi Sekolah Kabupaten Pinrang 2020-2023

Secara umum, APS pada kelompok umur 13-15 tahun dan umur 16-18 tahun pada tahun 2023 cenderung meningkat. Tercatat APS kelompok umur 13-15 tahun sebesar 90,63 (2022) meningkat menjadi 91,78 (2023). Begitu pula untuk APS kelompok umur 16-18 tahun, terjadi peningkatan APS dari 73,59 (2022) menjadi 73,75 (2023).

Penurunan APS yang paling tinggi terjadi pada kelompok umur 13-15 tahun. Pada tahun 2022 APS umur 13-15 tahun menurun cukup tinggi menjadi 90,63. Pada tahun 2023 kelompok umur 13-15 tahun mengalami kenaikan menjadi 91,78 tetapi masih dibawah jika dibandingkan tahun 2021 92,96. Diharapkan pada tahun-tahun mendatang khususnya pemerintah dapat terus memacu berbagai pihak agar lebih mempermudah masyarakat umum untuk mengenyam pendidikan SMP/ sederajat.

Selain pada jenjang SMP/ sederajat, jenjang pendidikan yang tidak kalah penting yaitu jenjang SMA/ sederajat. Kita ketahui bahwa jenjang SMA/ sederajat adalah pintu gerbang untuk dapat melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi atau saat ini menjadi syarat minimal untuk bekerja pada level terendah. Oleh karena itu, perlu pemikiran mengenai skema peningkatan angka partisipasi sekolah contohnya dengan memperbanyak beasiswa bagi masyarakat tidak mampu dan peningkatan konseling pendidikan yang lebih intensif.

Permasalahan klasik dalam dunia pendidikan dan tentunya menghambat tercapainya kapabilitas dasar penduduk di bidang pendidikan adalah mahalnya biaya pendidikan. Pendidikan tidak

dapat memberikan keuntungan langsung secara ekonomi sedangkan semakin mahalnya biaya pendidikan bagi sebagian masyarakat berdampak pada pilihan untuk tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi atau menamatkan pendidikan yang sedang dijalani (putus sekolah).

Mengingat pentingnya pendidikan maka perhitungan IPM menggunakan salah satu komponen pembentuk dari dimensi pengetahuan yang diukur melalui tingkat pendidikan. Dalam penghitungan IPM metode baru, indikator yang digunakan adalah Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Berawal tahun 1984 pemerintah mencanangkan gerakan wajib belajar untuk anak umur 7-12 tahun. Selain bertujuan untuk mereduksi persentase penduduk yang tidak tamat SD, secara implisit kebijakan ini juga menegaskan bahwa pendidikan SD merupakan suatu kebutuhan dasar bagi setiap penduduk. Sejalan dengan tuntutan global, pemerintah juga menuangkan kebijaksanaan pengembangan SDM dalam Garis Besar Haluan Negara (GBHN) 1993, selanjutnya pada tanggal 2 Mei 1994, pemerintah mencanangkan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun. Dengan kata lain, pendidikan SMP sudah dianggap sebagai kebutuhan dasar setiap penduduk.

Jika harus membandingkan dengan capaian SDGs (*Sustainable Development Goals*) atau kelanjutan MDGs (*Millenium Development Goals*) yang salah satu tujuannya adalah pendidikan dasar untuk semua maka kondisi tahun 2023 di Kabupaten Pinrang hanya pada tahap level SD saja yang telah memenuhi kriteria SDGs

dan diharapkan tidak hanya pada level SD Kabupaten Pinrang bisa mencapai APS 100, tetapi juga pada jenjang berikutnya SMP dan SMA, tentunya dengan kerja keras dari seluruh pihak yang berkepentingan.

Berdasarkan data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pinrang dalam publikasi Kabupaten Pinrang Dalam Angka 2024 untuk tahun ajaran 2023/2024, pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Pinrang tercatat sebanyak 328 sekolah, dengan jumlah guru sebanyak 3.021 orang dan jumlah murid sebanyak 40.276 orang. Kondisi di Kabupaten Pinrang Tahun Ajaran 2023/2024 pada jenjang pendidikan SD, seorang guru (baik guru tetap/PNS maupun honorer) rata-rata mengajar 13-14 orang murid, dengan kemampuan daya tampung sekolah mencapai 122-123 orang murid.

Tabel 2. Banyaknya Sekolah, Guru, Murid Tingkat Pendidikan SD Menurut Kecamatan di Kabupaten Pinrang Tahun Ajaran 2023/2024

Kecamatan	Sekolah	Murid	Guru	Rasio Murid-Guru
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Suppa	27	3.236	223	14,51
Mattiro Sompe	24	2.978	196	15,19
Lanrisang	19	1.721	148	11,63
Mattiro Bulu	26	2.833	226	12,54
Watang Sawitto	35	6.592	423	15,58
Paleteang	25	4.165	256	16,27
Tiroang	19	2.409	176	13,69
Patampanua	32	3.345	285	11,74
Cempa	19	1.950	176	11,08
Duampanua	40	4.723	362	13,05
Batulappa	14	1.112	115	9,67
Lembang	48	5.212	435	11,98
Pinrang	328	40.276	3.021	13,33

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pinrang

Tabel 3. Banyaknya Sekolah, Guru, Murid Tingkat Pendidikan MI Menurut Kecamatan di Kabupaten Pinrang Tahun Ajaran 2023/2024

Kecamatan	Sekolah	Murid	Guru	Rasio Murid-Guru
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Suppa	2	337	31	10,87
Mattiro Sompe	4	397	40	9,93
Lanrisang	3	130	33	3,94
Mattiro Bulu	3	327	24	13,63
Watang Sawitto	4	520	36	14,44
Paletang	1	88	11	8,00
Tiroang	-	-	-	-
Patampanua	4	540	37	14,59
Cempa	-	-	-	-
Duampanua	4	420	32	13,13
Batulappa	2	178	20	8,90
Lembang	2	219	17	12,88
Pinrang	29	3.156	281	11,23

Sumber: Kementerian Agama Kabupaten Pinrang

Untuk pendidikan Madrasah Ibtidaiyah (MI) di Kabupaten Pinrang tercatat berjumlah 29 madrasah, 281 guru dan 3.156 murid. Kondisi ini menunjukkan bahwa rata-rata guru di MI mengajar 11-12 orang murid, dengan kemampuan daya tampung sekolah mencapai 108-109 orang murid.

Tabel 4. Banyaknya Sekolah, Guru, Murid Tingkat Pendidikan SMP Menurut Kecamatan di Kabupaten Pinrang Tahun Ajaran 2023/2024

Kecamatan	Sekolah	Murid	Guru	Rasio Murid-Guru
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Suppa	4	1.000	182	5,49
Mattiro Sompe	3	772	69	11,19
Lanrisang	2	438	29	15,10
Mattiro Bulu	4	1.130	110	10,27
Watang Sawitto	8	2.742	239	11,47
Paletang	2	1.049	82	12,79
Tiroang	4	630	64	9,84
Patampanua	5	1.265	127	9,96
Cempa	3	626	61	10,26
Duampanua	7	1.552	154	10,08
Batulappa	4	251	57	4,40
Lembang	11	1.678	190	8,83
Pinrang	57	13.133	1.364	9,63

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pinrang

Sementara pada jenjang pendidikan SMP tercatat jumlah sekolah sebanyak 57 unit, guru sebanyak 1.364 orang dan murid sebanyak 13.133 orang. Pada jenjang ini, seorang guru PNS maupun honorer rata-rata mengajar 9-10 orang murid, dengan kemampuan daya tampung sekolah mencapai 230-231 orang murid.

Berikutnya pada jenjang pendidikan MTs tercatat jumlah madrasah sebanyak 26 unit, guru sebanyak 372 orang dan murid sebanyak 3.929 orang. Pada jenjang ini, seorang guru PNS maupun honorer rata-rata mengajar 10-11 orang murid, dengan kemampuan daya tampung sekolah mencapai 151-152 orang murid.

Tabel 5. Banyaknya Sekolah, Guru, Murid Tingkat Pendidikan MTs Menurut Kecamatan di Kabupaten Pinrang Tahun Ajaran 2023/2024

Kecamatan	Sekolah	Murid	Guru	Rasio Murid-Guru
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Suppa	1	284	26	10,92
Mattiro Sompe	1	240	10	24,00
Lanrisang	3	496	39	12,72
Mattiro Bulu	3	436	43	10,14
Watang Sawitto	3	400	33	12,12
Paleteang	4	892	105	8,50
Tiroang	1	218	16	13,63
Patampanua	2	155	15	10,33
Cempa	1	52	6	8,67
Duampanua	4	442	35	12,63
Batulappa	2	158	26	6,08
Lembang	1	156	18	8,67
Pinrang	26	3.929	372	10,56

Sumber: Kementerian Agama Kabupaten Pinrang

Apabila dikaitkan dengan program wajib belajar 9 tahun, maka anak umur 7-15 tahun harus mengikuti program pendidikan. Upaya pemerintah untuk meningkatkan partisipasi sekolah melalui program wajib belajar 9 tahun begitu gencarnya. Hal ini menunjukkan kemampuan daya serap sekolah dasar maupun sekolah menengah pertama di Kabupaten Pinrang relatif perlu ditingkatkan. Tetapi perlu diingat bahwa harapan dan target yang sebenarnya ingin dicapai adalah agar tidak ada lagi anak umur 7-15 tahun yang tidak bersekolah.

Keberhasilan pembangunan suatu bangsa sangat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan penduduknya. Pendidikan merupakan pembentuk watak bangsa di segala bidang kehidupan, khususnya dalam meningkatkan mutu sumber daya manusia. Upaya untuk mencapai tujuan tersebut adalah dengan meningkatkan kualitas tenaga pendidik di berbagai bidang ilmu pengetahuan serta penyediaan sarana dan prasarana pendidikan. Selain itu, hendaknya perlu juga didukung dengan akses yang mudah menuju fasilitas pendidikan dan beasiswa bagi siswa yang kurang mampu.

Berdasarkan tabel 6, tercatat jumlah sekolah SMA/SMK sebanyak 31 sekolah, guru sebanyak 1.147 orang dan murid sebanyak 13.706 orang. Pada jenjang ini, seorang guru rata-rata mengajar 11-12 orang murid, dengan kemampuan daya tampung sekolah rata-rata mencapai 442-443 orang murid.

Tabel 6. Banyaknya Sekolah, Guru, Murid Tingkat Pendidikan SMA/SMK Menurut Kecamatan di Kabupaten Pinrang Tahun Ajaran 2023/2024

Kecamatan	Sekolah	Murid	Guru	Rasio Murid-Guru
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Suppa	2	775	83	9,34
Mattiro Sompe	1	749	51	14,69
Lanrisang	1	410	31	13,23
Mattiro Bulu	2	1.523	109	13,97
Watang Sawitto	9	4.704	344	13,67
Paleteang	4	252	95	2,65
Tiroang	2	745	66	11,29
Patampanua	2	1.252	91	13,76
Cempa	1	371	32	11,59
Duampanua	4	1.559	138	11,30
Batulappa	1	150	26	5,77
Lembang	2	1.216	81	15,01
Pinrang	31	13.706	1.147	11,95

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pinrang

Tabel 7 menunjukkan data pada jenjang pendidikan MA. Dengan jumlah sekolah MA sebanyak 9 madrasah, guru sebanyak 173 orang dan murid sebanyak 1.790 orang. Pada jenjang ini, seorang guru rata-rata mengajar 10-11 orang murid, dengan kemampuan sekolah rata-rata mencapai 198-199 orang murid.

Tabel 7. Banyaknya Sekolah, Guru, Murid Tingkat Pendidikan MA Menurut Kecamatan di Kabupaten Pinrang Tahun Ajaran 2023/2024

Kecamatan	Sekolah	Murid	Guru	Rasio Murid-Guru
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Suppa	1	133	15	8,87
Mattiro Sompe	1	125	11	11,36
Lanrisang	2	198	23	8,61
Mattiro Bulu	1	140	9	15,56
Watang Sawitto	1	75	16	4,69
Paletang	2	951	84	11,32
Tiroang	-	-	-	-
Patampanua	-	-	-	-
Cempa	-	-	-	-
Duampanua	1	168	15	11,20
Batulappa	-	-	-	-
Lembang	-	-	-	-
Pinrang	9	1.790	173	10,35

Sumber: Kementerian Agama Kabupaten Pinrang

Jika diamati secara seksama, terlihat bahwa minat masyarakat pada sekolah MI, MTs, maupun MA tergolong lebih rendah dibandingkan sekolah konvensional, yaitu SD, SMP dan SMA/SMK baik negeri maupun swasta. Sehingga hal ini mempengaruhi pula jumlah murid serta guru di tiap jenjang pendidikan.

Pendidikan agama di sekolah sebenarnya memiliki andil besar menjadi penentu pembentukan watak dan karakter manusia terutama dari segi akhlak. Akan tetapi, mayoritas orang tua menganggap bahwa sekolah berbasis agama akan memberatkan anak dari segi kuantitas yang dipelajari dengan waktu belajar yang sama dengan sekolah konvensional. Selain itu masih ada stigma masyarakat bahwa pendidikan berbasis agama adalah pendidikan kelas dua yang dianggap terbelakang, sulit dan tidak bermutu.

Sekolah berbasis agama seperti MI, MTs, dan MA selayaknya perlu mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah agar masyarakat lebih cenderung memilih sekolah tersebut. Kini telah muncul sekolah-sekolah berbasis agama yang bermutu dan justru menjadi sekolah unggulan. Bahkan turut mengantarkan para muridnya mencapai prestasi yang membanggakan baik di tingkat nasional maupun internasional. Oleh karena itu, perlu kerja keras untuk menggaungkan madrasah sebagai lembaga pendidikan bermutu sekaligus wadah untuk membentuk watak islami pada anak-anak.

2.2.1 Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah

Penghitungan IPM metode baru tidak lagi menggunakan Angka Melek Huruf (AMH) sebagai salah satu komponen pendidikan. Akan tetapi, menggunakan Harapan Lama Sekolah (HLS). Melek huruf tidak lagi digunakan karena tidak dapat membedakan tingkat pendidikan antar daerah dengan baik (angka melek huruf sebagian daerah sudah tinggi). Sebagai gantinya digunakan Harapan Lama Sekolah (HLS)

karena diharapkan menggambarkan aspek pengetahuan (*knowledge*) dalam pembangunan manusia secara nyata.

Harapan Lama Sekolah (HLS) adalah lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu dimasa mendatang. HLS diperoleh dengan asumsi bahwa kemungkinan anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan rasio penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama pada saat ini. Harapan Lama Sekolah yang digunakan adalah untuk penduduk umur tujuh tahun ke atas. Kegunaan HLS untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.



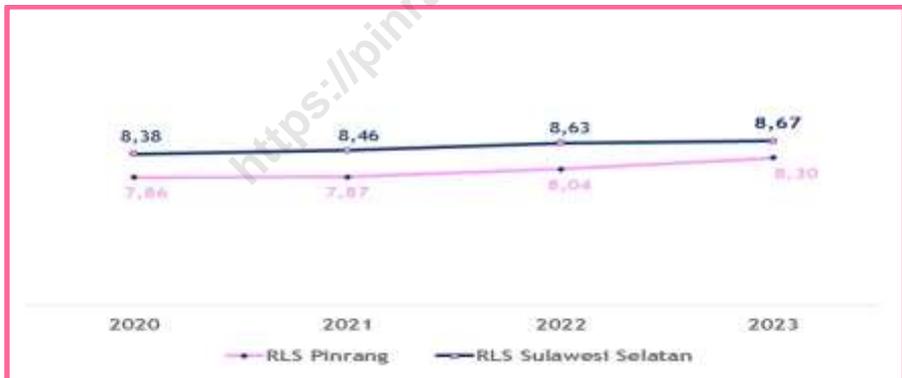
Sumber: Berita Resmi Statistik

Gambar 4. Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Pinrang dan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020-2023

Berdasarkan Gambar 4 Harapan Lama Sekolah (HLS) penduduk umur 7 tahun ke atas Kabupaten Pinrang memperlihatkan tren yang meningkat selama 4 tahun terakhir. HLS Kabupaten Pinrang tahun 2023

adalah 13,27 tahun. Sejak tahun 2020 HLS Kabupaten Pinrang stabil di angka 13 tahun. HLS Kabupaten Pinrang pada tahun 2020-2023 masih berada di bawah angka HLS Provinsi Sulawesi Selatan. Dibandingkan dengan seluruh kabupaten/kota se-Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Pinrang memiliki angka harapan lama sekolah ranking ke 12 tertinggi.

Selain HLS, indikator lain untuk menggambarkan dimensi pengetahuan pada pembangunan manusia adalah Rata-rata Lama Sekolah. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Untuk rata-rata lama sekolah, populasi yang digunakan adalah penduduk berumur 25 tahun keatas karena diasumsikan bahwa pada umur 25 tahun proses pendidikan sudah berakhir.



Sumber: Berita Resmi Statistik

Gambar 5. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Penduduk Umur 25 Tahun Keatas Kabupaten Pinrang dan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020-2023

Gambar 5 menyajikan angka RLS penduduk Pinrang dan Provinsi Sulawesi Selatan kurun waktu tahun 2020-2023. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) penduduk Kabupaten Pinrang tahun 2020 sebesar 7,86

tahun, dan terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2023, Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Pinrang sebesar 8,30 yang sebelumnya 8,04 pada tahun 2022. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata penduduk yang bersekolah di Kabupaten Pinrang hanya mampu menyelesaikan sekolah sampai dengan kelas 1-2 SMP. Secara umum, RLS Kabupaten Pinrang terlihat masih dibawah rata-rata Provinsi Sulawesi Selatan selama kurun waktu 2020-2023, hal ini mengindikasikan perlunya peningkatan terhadap akses pendidikan yang lebih merata tidak hanya berfokus di pusat kota saja tetapi juga untuk daerah sulit, di pinggiran kota ataupun kecamatan terpencil.



Sumber: Berita Resmi Statistik

Gambar 6. Selisih Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Pinrang dengan Provinsi Sulawesi Selatan, 2020-2023 (Tahun)

Berdasarkan gambar 6 tampak HLS dan RLS Kabupaten Pinrang masih terdapat kesenjangan dengan Provinsi Sulawesi Selatan. Pada komponen Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Pinrang berada di bawah HLS dan RLS Provinsi Sulawesi Selatan. Selama periode tahun 2020 hingga 2022 tren menunjukkan kesenjangan yang meningkat baik pada pada Rata-rata

Lama Sekolah maupun Harapan Lama Sekolah, tetapi pada tahun 2023 kesenjangan Rata-rata Lama Sekolah maupun Harapan Lama Sekolah mengalami penurunan.

2.3 Kesehatan

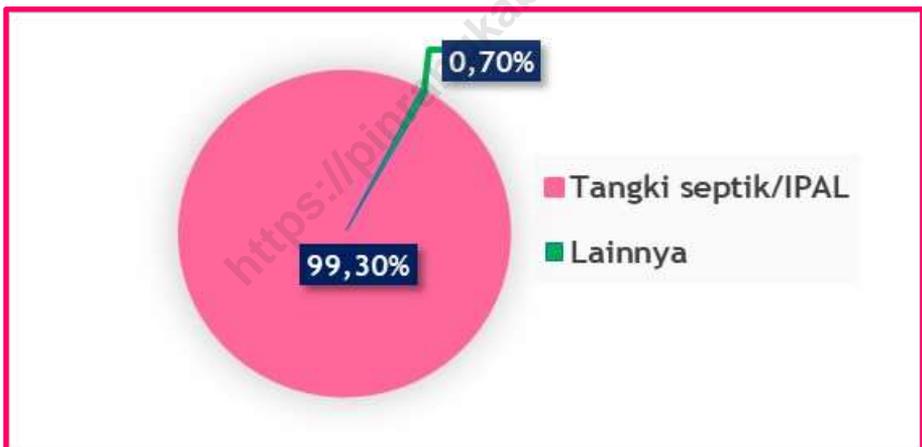
Salah satu upaya dalam peningkatan mutu SDM adalah melalui peningkatan kualitas hidup manusia dari segi kesehatan. Perlu disadari, selain pendidikan, aspek kesehatan tak kalah pentingnya sebagai salah satu pilar dalam pembangunan manusia. Sehingga sudah sepantasnyalah pemerintah dapat lebih meningkatkan fasilitas kesehatan sehingga derajat kesehatan masyarakat dapat meningkat.

Seiring terjadinya peningkatan derajat kesehatan masyarakat, salah satu indikator yang dapat diukur adalah angka morbiditas. Penduduk yang mengalami morbiditas adalah penduduk yang mengalami keluhan kesehatan dan menyebabkan gangguan dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Berdasarkan data Susenas, angka morbiditas Kabupaten Pinrang sebesar 12,54 persen pada tahun 2023 turun dibanding tahun 2022. Angka ini menunjukkan terjadi peningkatan kualitas kesehatan yang cukup signifikan pada penduduk Kabupaten Pinrang dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 14,46 persen.

Sementara itu tingkat morbiditas dipengaruhi oleh beberapa faktor penentu diantaranya faktor lingkungan, perilaku kesehatan, dan pelayanan kesehatan. Dalam konsep derajat kesehatan, faktor terbesar yang memengaruhi derajat kesehatan seseorang adalah

factor lingkungan. Konsep ini menyatakan bahwa lingkungan yang baik akan mendorong secara langsung peningkatan derajat kesehatan.

Didalam *SDGs* tujuan ke-6 (air bersih dan sanitasi layak) pada sektor lingkungan hidup adalah memastikan masyarakat mencapai akses universal air bersih dan sanitasi. Sanitasi layak adalah fasilitas sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan yaitu dilengkapi dengan kloset leher angsa dan terdapatnya pembuangan akhir tinja berupa tangki septik/ipal. Pada tahun 2023 fasilitas BAB layak yakni terdapatnya pembuangan akhir tinja berupa tangki/spal di Kabupaten Pinrang adalah sebesar 99,30 persen. Sedangkan lainnya (kolam/sawah/dll) sebesar 0,70 persen.

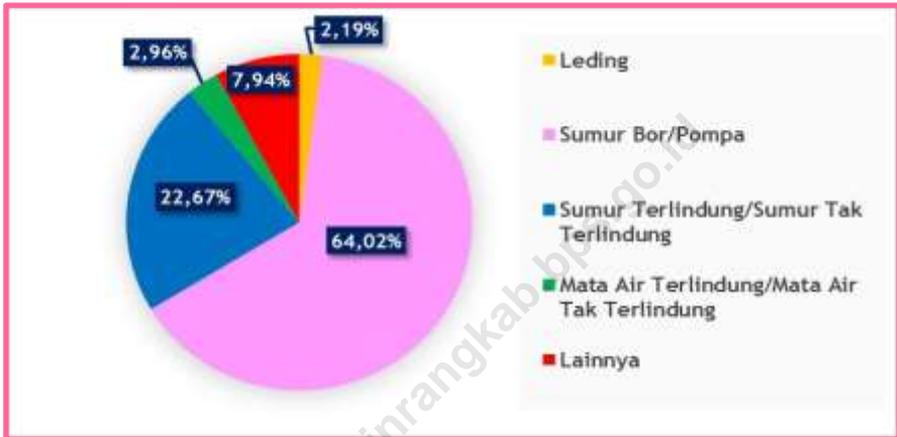


Sumber: BPS Pinrang, diolah

Gambar 7. Persentase Rumah Tangga Menurut Karakteristik dan Tempat Pembuangan Akhir Tinja, 2023

Di Kabupaten Pinrang pada tahun 2023 sebanyak 64,02 persen rumah tangga yang menggunakan sumur bor/pompa untuk mandi/cuci/dll. Selain itu terdapat pula rumah tangga yang menggunakan sumur terlindung/sumur tak terlindung sebanyak 22,67

persen. Sekitar 2,19 persen rumah tangga menggunakan leding. Sementara itu, sekitar 2,96 persen rumah tangga menggunakan mata air terlindung/mata air tak terlindung. Selebihnya sebanyak 7,94 persen rumah tangga menggunakan sumber air lainnya untuk mandi/cuci/dll.



Sumber: Kabupaten Pinrang dalam Angka 2024

Gambar 8. Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air Utama Untuk Mandi/Cuci/Dll, 2023

Indikator-indikator di atas mempengaruhi kualitas pembangunan manusia di suatu daerah. Oleh karenanya perlu diperhatikan indikator lain selain komponen IPM yang ada, karena derajat kesehatan dipengaruhi oleh banyak indikator dasar dan diharapkan pembangunan dimulai dari indikator dasar tersebut.

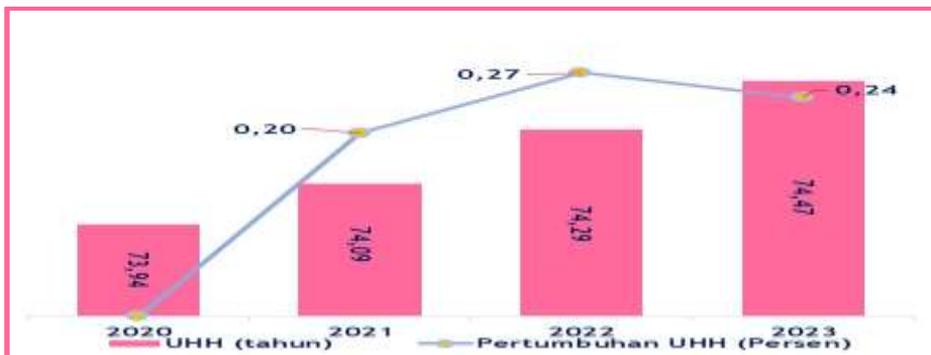
2.3.1 Harapan Hidup

Salah satu komponen dalam penghitungan IPM adalah Umur Harapan Hidup (UHH). Dimensi umur panjang dan hidup sehat yang diwakili oleh Umur Harapan Hidup (UHH) merupakan indikator yang

dapat mencerminkan derajat hidup suatu wilayah, baik dari sarana prasarana, akses, hingga kualitas kesehatan. Sumber data utama dalam perhitungan UHH saat ini adalah hasil *Long Form* Sensus Penduduk 2020.

Berdasarkan hasil olah *Long Form* Sensus Penduduk 2020, tren Umur Harapan Hidup (UHH) saat lahir dari tahun 2020-2023 cenderung meningkat setiap tahunnya. Capaian UHH tahun 2023 sebesar 74,47 tahun, tumbuh sebesar 0,24 persen dibandingkan tahun 2022. Walaupun tidak secepat pertumbuhan pada tahun 2022 yang mencapai 0,27 persen.

Kondisi peningkatan UHH menunjukkan harapan bayi yang baru lahir untuk hidup lebih lama semakin tinggi, karena membaiknya derajat kesehatan masyarakat sehingga angka kematian bayi turut berkurang. Kemajuan teknologi di bidang kesehatan, peningkatan sarana dan prasarana kesehatan, serta kepedulian masyarakat terhadap gaya hidup sehat yang meningkat menjadi salah satu penyebab meningkatnya UHH di Kabupaten Pinrang.



Sumber: Berita Resmi Statistik

Gambar 9. Tren Umur Harapan Hidup (UHH) dan Pertumbuhannya di Pinrang Tahun 2020-2023

Kondisi UHH tidak berdiri sendiri melainkan memiliki keterkaitan dengan variable kesehatan lainnya. Seperti dijelaskan sebelumnya, kondisi lingkungan dan pelayanan kesehatan memiliki keterkaitan terhadap kualitas Umur Harapan Hidup. Selanjutnya dijelaskan beberapa variabel yang memiliki keterkaitan terhadap UHH, antara lain angka kematian bayi, angka kematian balita, angka kematian ibu dan yang tak kalah pentingnya adalah status gizi baik anak-anak maupun kelompok ibu-ibu umur 15-49 tahun. Mengingat besarnya resiko seorang ibu dalam melahirkan seorang anak, maka sangat diperlukan adanya kemudahan untuk akses ke pelayanan kesehatan terutama pada saat kelahiran dengan resiko tinggi.

Tabel 8. Banyaknya Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Pinrang Tahun 2023

Uraian	Jumlah
(1)	(2)
Rumah Sakit	3
Puskesmas	18
Klinik	22
Rumah Bersalin	0
Puskesmas Pembantu (Pustu)	45
Posyandu	382
Jumlah	470

Sumber: Kabupaten Pinrang dalam Angka 2024

Dari Tabel 8 di atas terlihat bahwa ketersediaan sarana kesehatan di Kabupaten Pinrang cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari adanya rumah sakit maupun sarana kesehatan lainnya. Sehingga, masyarakat memiliki alternatif berobat yang lebih baik fasilitasnya. Keberadaan Puskesmas maupun Puskesmas Pembantu (Pustu) di

Kabupaten Pinrang yang berada di seluruh kecamatan bahkan kelurahan maupun desa, dirasa sangat membantu masyarakat untuk bisa berobat yang relatif dekat, murah dan berkualitas.

Puskesmas adalah fasilitas kesehatan terdepan masyarakat artinya masyarakat lebih mudah mendapatkan fasilitas kesehatan di lingkungan tinggalnya tanpa harus jauh meninggalkan desa/kecamatan. Rasio penduduk terhadap puskesmas yang dibantu oleh Puskesmas Pembantu (Pustu) dan posyandu di Kabupaten Pinrang pada tahun 2023 sebesar 1 : 942,34 yang artinya satu puskesmas yang dibantu pustu dan posyandu harus melayani sekitar 942-943 penduduk. Rasio ini menunjukkan bahwa beban puskesmas maupun pustu sangat besar karena harus melayani kesehatan penduduk sembilan ratus penduduk. Oleh karena itu, keberadaan puskesmas, pustu, dan posyandu perlu diperbanyak lagi agar pelayanan kesehatan terhadap masyarakat lebih optimal.

Jika dilihat dari jumlah tenaga medisnya, pada tahun 2023, di Kabupaten Pinrang terdapat 101 dokter, 442 perawat, 271 bidan, 50 tenaga kefarmasian, 90 tenaga kesehatan masyarakat, 20 tenaga kesehatan lingkungan, 29 tenaga gizi dan 42 ahli teknologi laboratorium. Total seluruh tenaga kesehatan mencapai 944 orang. Rasio dokter terhadap penduduk sebesar 1:4.151,88, artinya satu dokter harus melayani sekitar 4.151-4.152 penduduk. Rasio bidan terhadap penduduk sebesar 1:1.547,38, artinya satu bidan harus melayani sekitar 1.547-1.548 penduduk. Rasio penduduk terhadap perawat pada tahun 2023 sebesar 1:948,73, artinya satu perawat harus mampu merawat 948-949 penduduk.

Tabel 9. Banyaknya Tenaga Kesehatan Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Pinrang Tahun 2023

Kecamatan	Tenaga Kesehatan								
	Dokter	Perawat	Bidan	Tenaga Kefarmasian	Tenaga Kesehatan Masyarakat	Tenaga Kesehatan Lingkungan	Tenaga Gizi	Ahli Teknologi Laboratorium	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Suppa	5	15	18	2	7	2	3	4	51
Mattiro Sompe	4	10	11	1	2	2	1	-	27
Lanrisang	4	9	6	1	7	1	1	1	26
Mattiro Bulu	4	16	18	-	3	1	2	1	41
Watang Sawitto	47	312	118	41	43	5	15	23	557
Paleteang	5	10	7	-	2	-	1	1	21
Tiroang	3	6	12	-	2	2	1	2	25
Patampanua	4	10	16	-	1	1	2	2	32
Cempa	4	13	14	1	5	1	1	2	37
Duampanua	14	23	25	1	10	3	-	1	63
Batulappa	2	5	11	1	2	1	1	2	23
Lembang	5	13	15	2	6	1	1	3	41
Total	101	442	271	50	90	20	29	42	944

Sumber: Kabupaten Pinrang dalam Angka 2024



Sumber: Kabupaten Pinrang dalam Angka 2024

Gambar 10. Banyaknya Dokter Spesialis, Dokter Umum dan Dokter Gigi di Kabupaten Pinrang Tahun 2023

Gambar 10 menunjukkan di Kabupaten Pinrang tahun 2023 memiliki jumlah dokter umum sebanyak 67 orang, dokter gigi sebanyak 18 orang, dan dokter spesialis sebanyak 16 orang. Rasio penduduk terhadap dokter pada tahun 2023 sebesar 1:4.151,88 artinya satu dokter harus melayani sekitar 4.151-4.152 penduduk. Hal ini berarti jumlah dokter di Kabupaten Pinrang masih sangat perlu ditingkatkan karena pertumbuhan penduduk berjalan sangat cepat, sementara penambahan jumlah tenaga medis tidak sebanding.

2.3.2 Keluarga Berencana

Program KB adalah program yang secara khusus dimaksudkan sebagai upaya penanggulangan laju pertumbuhan penduduk alami, yaitu melalui pembatasan dan pengaturan jarak kelahiran. Memiliki pengetahuan tentang pengendalian kelahiran dan keluarga berencana

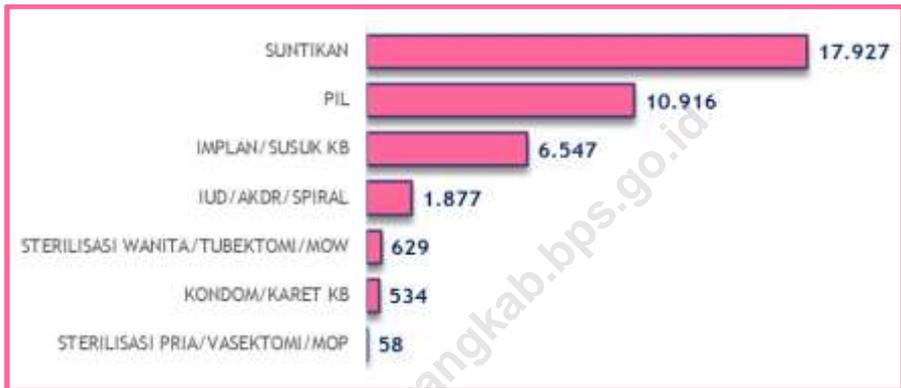
penting agar dapat memahami tentang berbagai alat/cara kontrasepsi, serta pemakaian alat/cara KB yang tepat dan efektif.

Tingginya angka pemakaian alat kontrasepsi oleh Pasangan Usia Subur (PUS) dapat menggambarkan tingginya tingkat kesadaran masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam pelaksanaan program pemerintah dalam rangka mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera. Tinggi rendahnya partisipasi masyarakat terhadap program keluarga berencana dapat disebabkan oleh berbagai faktor, diantaranya alasan fertilitas, adat kebiasaan/paham keagamaan, pengetahuan tentang alat/cara KB yang sesuai, biaya yang relatif mahal, akses ke tempat pelayanan KB yang sulit terjangkau, atau alasan lainnya yang menyebabkan seseorang berpartisipasi atau tidak dalam program keluarga berencana.

Angka prevalensi pemakaian kontrasepsi adalah angka yang menunjukkan banyaknya PUS yang sedang memakai kontrasepsi pada saat pencacahan dibandingkan dengan seluruh PUS. Angka prevalensi kontrasepsi ini sering disebut dengan CPR (*Contraceptive Prevalence Rate*). Informasi tentang besarnya CPR sangat bermanfaat untuk menetapkan kebijakan pengendalian kependudukan, serta penyediaan pelayanan KB, baik dalam bentuk mempersiapkan pelayanan kontrasepsi seperti sterilisasi, pemasangan IUD, persiapan alat dan obat kontrasepsi, maupun pelayanan konseling untuk menampung kebutuhan dan menanggapi keluhan pemakaian kontrasepsi.

Alat/cara KB ada tiga macam, yaitu cara modern, alamiah, dan cara tradisional. Alat/cara KB modern dapat bersifat kimia (suntikan, pil, dan susuk) dan dapat bersifat non-kimia (spiral, kondom, dan

sterilisasi). Cara KB alamiah (*natural family planning methods*) antara lain meliputi sistem kalender, pantang berkala, dan senggama terputus. Cara tradisional meliputi penggunaan ramu-ramuan tradisional yang dipercayai mempunyai khasiat mencegah kehamilan.



Sumber: Kabupaten Pinrang dalam Angka 2024

Gambar 11. Jumlah peserta KB Aktif Menurut Jenis Alat KB, Tahun 2023

Bagi penduduk yang sedang ber-KB, metode kontrasepsi yang paling banyak digunakan oleh masyarakat Kabupaten Pinrang adalah suntikan KB sebanyak 17.927 atau sekitar 46,58 persen dari total peserta KB aktif. Kemudian pil KB sebanyak 28,36 persen, susuk KB/implan sebesar 17,01 persen, IUD/spiral 4,88 persen dan tercatat 1,63 persen melakukan sterilisasi wanita/MOW, sterilisasi pria/MOP 0,15 persen, selebihnya menggunakan kondom/karet KB sebanyak 1,39 persen.

2.3.3 Pemberian ASI

Hal yang tak kalah penting dalam peningkatan kualitas SDM adalah pemberian Air Susu Ibu (ASI) untuk bayi berumur di bawah 2 tahun (baduta). ASI adalah makanan terbaik dan paling penting bagi seorang bayi. Secara alami, baik kandungan gizi maupun imun/zat kekebalan tubuh pada ASI telah memenuhi seluruh kebutuhan bayi dalam jangka waktu enam bulan. Bahkan *UNICEF* telah menyatakan kepeduliannya terhadap perlunya untuk meningkatkan penggunaan ASI.

Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2023 menunjukkan bahwa rata-rata lama pemberian ASI untuk bayi 0-23 bulan di Kabupaten Pinrang adalah 11 sampai 12 bulan. Hal tersebut berarti kesadaran masyarakat akan pemberian ASI selama 2 tahun di Kabupaten Pinrang tergolong masih kurang. Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya ASI masih sangat perlu ditingkatkan.

2.4 Pengeluaran Per kapita

Salah satu aspek pokok dalam permasalahan pembangunan adalah kemiskinan. Kemiskinan dapat diartikan sebagai ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar yaitu makanan dan non makanan yang diukur berdasarkan garis kemiskinan. Kemiskinan diyakini disebabkan beberapa faktor yang bersifat multi aspek, kemiskinan menjadikan seseorang kehilangan kesempatan untuk meningkatkan potensi dirinya.

Salah satu penyebab kemiskinan adalah faktor pengangguran. Ketidakmampuan memperoleh pendapatan yang dikarenakan tidak bekerja adalah masalah besar yang dihadapi hampir di setiap wilayah. Di Kabupaten Pinrang sendiri, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menunjukkan pergerakan yang fluktuatif selama kurun waktu tahun 2020-2023.



Sumber: Badan Pusat Statistik

Gambar 12. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Pinrang Tahun 2020-2023

Gambar 12 menunjukkan pada tahun 2020, TPT Kabupaten Pinrang sebesar 4,19 persen. Angka ini cukup tinggi mengingat pada tahun 2020 terjadi kasus pandemic COVID-19 yang berimbas kepada berbagai sektor termasuk ketenagakerjaan, banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Pada tahun berikutnya yakni pada tahun 2021 dan 2022, kondisi perekonomian mengalami perbaikan pemulihan Covid-19, sehingga TPT menurun dilevel 4,06 persen ditahun 2021 dan kembali turun di tahun 2022 dilevel 2,79 persen. Namun pada tahun 2023 kembali mengalami peningkatan menjadi 3,64 persen.

Selanjutnya, dalam perkembangan kesejahteraan penduduk salah satunya dapat diukur perubahan pola konsumsi rumah tangga. Jika alokasi untuk konsumsi makanan semakin rendah maka untuk konsumsi non-makanan menjadi semakin tinggi. Peningkatan pendapatan diikuti dengan peningkatan konsumsi bukan makanan, karena pada saat tertentu konsumsi untuk makanan sampai pada titik jenuh. Pengeluaran per kapita merupakan salah satu komponen dalam perhitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Komponen pengeluaran terbagi atas pengeluaran untuk makanan dan pengeluaran untuk non makanan.

Aspek yang tak kalah penting menggambarkan kualitas hidup manusia adalah standar hidup layak yang digambarkan dengan indikator pengeluaran per kapita per tahun yang disesuaikan. Indikator ini dapat mengetahui tingkat sensitivitas terhadap perubahan kondisi perekonomian. Selama periode 2020-2023 pengeluaran per kapita yang disesuaikan di Kabupaten Pinrang menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahunnya. Pada tahun 2020 tercatat pengeluaran per kapita per tahun sebesar 11.844 ribu rupiah, tiga tahun kemudian rata-rata pengeluaran per kapita adalah sebesar 12.559 ribu rupiah (2023). Kenaikan dalam kurun waktu empat tahun terakhir mencapai 715 ribu rupiah, kondisi ini cukup menggembirakan karena dapat diartikan rata-rata daya beli masyarakat Kabupaten Pinrang mengalami kenaikan lebih dari tujuh ratus ribu dalam 4 tahun terakhir.



Sumber: Berita Resmi Statistik

Gambar 13. Pengeluaran Per Kapita Per Tahun Disesuaikan Kabupaten Pinrang Tahun 2020-2023 (Rp.000)

Kecenderungan meningkatnya pengeluaran per kapita penduduk berkorelasi dengan kemajuan pembangunan di wilayah Kabupaten Pinrang. Dan hal ini berimplikasi pada semakin meningkatnya pendapatan penduduk pada hampir semua sektor. Selain itu peningkatan ini juga berkorelasi dengan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pinrang. Selama tahun 2020-2023, pendapatan per kapita penduduk cenderung menunjukkan tren yang semakin meningkat dan mengalami pertumbuhan positif, kecuali pada tahun 2020 saat terjadi pandemi mengalami pertumbuhan sebesar 0,14 persen. Pada tahun 2023, pengeluaran per kapita disesuaikan tumbuh positif sebesar 3,78 persen. Hal ini tidak terlepas dari implikasi kegiatan pembangunan yang terus berjalan di Kabupaten Pinrang, terutama di sektor pertanian, perdagangan dan jasa.

<https://pinrangkab.bps.go.id>

3

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

3





IPM sangat diperlukan sebagai salah satu instrument kebijakan fiskal dan juga dapat mencerminkan kinerja pemerintah pusat maupun daerah. Berbagai kebijakan pemerintah berlandaskan IPM adalah bentuk perhatian pemerintah terhadap kondisi dasar masyarakat yang terdiri dari kesehatan, pendidikan dan pendapatan. Oleh karenanya sangat dibutuhkan data yang terpercaya untuk menyusun itu semua.

Tinggi rendahnya IPM tidak dapat lepas dari program-program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Namun, yang perlu disadari adalah peningkatan IPM tidak serta merta terjadi dengan mudah karena proses pembangunan manusia tidak dapat dilakukan dalam waktu singkat.

Tercapainya kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan utama dari suatu pembangunan manusia. Berbagai upaya yang bisa dilakukan adalah dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan standar hidup, mengurangi kemiskinan, meningkatkan anggaran pendidikan, meningkatkan anggaran kesehatan, dan berbagai program lainnya.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah indeks komposit yang disusun dari tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup kesehatan, pengetahuan, serta standar hidup layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka

harapan hidup ketika lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi standar hidup layak digunakan indikator pengeluaran per kapita yang disesuaikan (PPP - *Purchasing Power Parity*/paritas daya beli dalam rupiah). Kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak.

Tabel 10. Dimensi, Indikator dan Indeks Dimensi Pembangunan Manusia

Dimensi	Indikator	Indeks Dimensi
(1)	(2)	(3)
Kesehatan	Angka Harapan saat lahir (UHH)	Indeks harapan hidup => Indeks kesehatan
Pengetahuan	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Indeks pendidikan =>
	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Indeks pengetahuan
Standar Hidup Layak	Pengeluaran per kapita disesuaikan (PPP Rupiah)	Indeks Pedapatan => Indeks Pengeluaran

3.1 Sumber Data

Sumber data utama yang digunakan dalam penghitungan IPM adalah data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) KOR dan Susenas Modul Konsumsi, data Survei Penduduk Antar Sensus (Supas), Proyeksi Penduduk, dan Indeks Harga Konsumen (IHK).

Data Susenas KOR digunakan untuk menghitung dua indikator pembentuk IPM yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) dan

Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Sementara Umur Harapan Hidup (UHH) dihitung menggunakan data hasil *Long Form* Sensus Penduduk 2020 (LF SP2020). Indikator daya beli atau PPP dihitung menggunakan data Susenas modul konsumsi yang didasarkan pada 96 komoditi. Sementara itu, untuk mendapatkan pengeluaran per kapita riil digunakan Indeks Harga Konsumen sebagai deflator.

3.2 Manfaat IPM

IPM ini dapat dimanfaatkan untuk beberapa, diantaranya:

➤ **Ukuran Keberhasilan**

IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia.

➤ **Target Pembangunan**

Dalam pembahasan asumsi makro di DPR-RI, IPM dijadikan salah satu indikator target pembangunan.

➤ **Dana Alokasi Umum**

IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator dalam penentuan Dana Alokasi Umum (DAU).

3.3 Komponen Indeks Pembangunan Manusia

3.3.1 Indeks Kesehatan

Umur Harapan Hidup (UHH) merupakan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. UHH dapat mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat. Penghitungan UHH melalui pendekatan tak langsung (*Indirect*

Estimation) menggunakan paket program *Micro Computer Program for Demographic Analysis (MCPDA)* atau *Mortpack*. Dari hasil proyeksi Sensus Penduduk 2010. Jenis data yang digunakan adalah data Anak Lahir Hidup (ALH) dan Anak Masih Hidup (AMH), selanjutnya dipilih metode Trussei dengan metode west yang dianggap sesuai dengan histori kependudukan Indonesia dengan negara-negara Asia Tenggara umumnya (Preston, 2004).

$$I_{KESEHATAN} = \frac{UHH - UHH_{min}}{UHH_{maks} - UHH_{min}}$$

Keterangan

Ikesehatan : Indeks Kesehatan

UHH : Umur Harapan Hidup

UHH_{min} : Umur Harapan Hidup Minimum 20 Tahun

UHH_{maks} : Umur Harapan Hidup Maksimum 85 Tahun

Indeks Kesehatan dihitung dengan menghitung nilai maksimum dan nilai minimum harapan hidup sesuai standar UNDP, yaitu angka tertinggi sebagai batas atas untuk penghitungan indeks dipakai 85 tahun dan terendah 20 tahun.

3.3.2 Indeks Pengetahuan

Komponen pembentuk IPM dari dimensi pengetahuan adalah Rata-Rata Lama Sekolah (*RLS/ Mean Years of Schooling*) dan Harapan Lama Sekolah (*HLS/ Expected Years of Schooling*). Pada proses pembentukan IPM, penggabungan kedua indikator ini digunakan sebagai indeks pengetahuan yang merupakan salah satu komponen pembentuk IPM.

Rata-rata lama sekolah (RLS) menggambarkan jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Cakupan penduduk yang dihitung RLS adalah penduduk berumur 25 tahun keatas. Penghitungan RLS pada umur 25 tahun ke atas mengikuti standar internasional yang digunakan UNDP.

$$I_{RLS} = \frac{RLS - RLS_{min}}{RLS_{maks} - RLS_{min}}$$

Keterangan:

- I_{RLS}* : Indeks Rata-rata Lama Sekolah
- RLS* : Rata-rata Lama Sekolah
- RLS_{min}* : Rata-rata Lama Sekolah Minimum 0 Tahun
- RLS_{maks}* : Rata-rata Lama Sekolah Maksimum 25 Tahun

Indeks RLS dihitung dengan menghitung nilai maksimum dan nilai minimum harapan hidup sesuai standar UNDP, yaitu angka tertinggi sebagai batas atas untuk penghitungan indeks dipakai 25 tahun dan terendah 0 tahun.

Harapan lama sekolah (HLS) adalah lamanya sekolah dalam tahun yang diharapkan dirasakan oleh anak umur tertentu pada masa mendatang. HLS dihitung pada umur 7 tahun ke atas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar. Untuk mengakomodir penduduk yang tidak tercakup dalam Susenas, HLS dikoreksi dengan siswa yang bersekolah di pesantren.

$$I_{HLS} = \frac{HLS - HLS_{min}}{HLS_{maks} - HLS_{min}}$$

Keterangan:

- IHLS : Indeks Harapan Lama Sekolah

- HLS : Harapan Lama Sekolah
 HLSmin : Harapan Lama Sekolah Minimum 0 Tahun
 HLSmaks : Harapan Lama Sekolah Maksimum 18 Tahun

HLS menggunakan batasan sesuai kesepakatan beberapa negara, yaitu batas maksimum 18 tahun, sedangkan batas minimumnya 0 (nol) tahun. Untuk memperoleh nilai Indeks pengetahuan maka kedua Indeks pembentuknya, baik Indeks Rata-rata Lama Sekolah maupun Indeks Harapan Lama Sekolah digabungkan dengan bobot yang sama.

$$I_{Pengetahuan} = \frac{I_{HLS} + I_{RLS}}{2}$$

Keterangan:

- IPengentahuan* : Indeks Pengetahuan
IRLS : Indeks Rata-rata Lama Sekolah
IHLS : Indeks Harapan Lama Sekolah

3.3.3 Indeks Pengeluaran

Dimensi selanjutnya dari ukuran kualitas hidup manusia adalah standar hidup layak. Dalam cakupan lebih luas, standar hidup layak menggambarkan tingkat kesejahteraan yang dinikmati oleh penduduk sebagai dampak semakin membaiknya ekonomi. Standar hidup layak diproksi dengan indikator pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Pengeluaran per kapita yang disesuaikan ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli.

Rata-rata pengeluaran per kapita setahun diperoleh dari Susenas Modul dan dibuat konstan/ riil dengan tahun dasar 2020=100. Penghitungan Paritas Daya Beli menggunakan 96 komoditas dengan rincian 66 komoditas merupakan makanan dan sisanya merupakan komoditas non makanan. Rumus untuk penghitungan Paritas Daya Beli adalah:

$$PPP_j = \prod_{i=1}^m \left(\frac{p_{ij}}{p_{ik}} \right)^{1/m}$$

Paritas Daya Beli dengan menggunakan harga komoditas di Jakarta Selatan sebagai pembanding harga di kabupaten/kota yang bersangkutan. Berdasarkan nilai rata-rata pengeluaran per kapita riil dan paritas daya beli diperoleh pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Setelah itu, Indeks pengeluaran sebagai komponen IPM dihitung dengan:

$$I_{Pengeluaran} = \frac{\ln(\text{pengeluaran}) - \ln(\text{pengeluaran}_{min})}{\ln(\text{pengeluaran}_{maks}) - \ln(\text{pengeluaran}_{min})}$$

Tabel 11. Komoditi Kebutuhan Pokok Dasar Penghitungan Daya Beli

Kelompok	Terpilih		
	Share Kelompok	Share	Jumlah Item
(1)	(2)	(3)	(4)
Makanan	47,29	39,82	66
Padi-padian	8,02	7,89	2
Umbi-umbian	0,42	0,23	2
Ikan/udang/cumi/kerang	3,95	2,30	7
Daging	2,06	1,69	3
Telur dan susu	2,76	2,37	4
Sayur-sayuran	3,56	2,04	7
Kacang-kacangan	1,26	1,17	2
Buah-buahan	2,21	1,22	7
Minyak dan lemak	1,79	1,75	3
Bahan minuman	1,64	1,47	3
Bumbu-bumbuan	0,95	0,40	3
Konsumsi lainnya	1,00	0,61	1
Makanan dan minuman jadi	11,80	10,94	19
Tembakau dan sirih	5,88	5,72	3
Non makanan	52,71	33,81	30
Perumahan dan fasilitas rumah tangga	20,58	15,74	10
Aneka barang dan jasa	18,79	15,50	12
Pakaian, alas kaki, tutup kepala	3,76	3,35	4
Barang tahan lama	6,15	1,22	4
Pajak, pungutan, asuransi	1,65	0,00	0
Keperluan, pesta, upacara/kendari	1,78	0,00	0
Total	100	73,63	96

Sumber: BPS, Susenas

Dalam menghitung indeks masing-masing komponen IPM digunakan batas maksimum dan minimum dibawah ini:

Tabel 12. Nilai Maksimum dan Minimum dari Setiap Komponen IPM

Komponen IPM	Maksimum	Minimum	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH)	85	20	Standar UNDP
Harapan lama sekolah (tahun)	18	0	Standar UNDP
Rata-rata lama sekolah (tahun)	15	0	Standar UNDP
Daya beli (rupiah)	26.572.352**)	1.007.436*)	Pengeluaran per kapita riil disesuaikan

Keterangan:

*) Daya beli minimum merupakan garis kemiskinan terendah kabupaten tahun 2010 (data empiris) yaitu di Tolikara-Papua.

***) Daya beli maksimum merupakan nilai tertinggi Kabupaten yang diproyeksikan hingga 2025 (akhir RPJPN) yaitu perkiraan pengeluaran per kapita Jakarta Selatan tahun 2025.

Selanjutnya nilai IPM dapat dihitung sebagai berikut:

$$IPM = \sqrt[3]{I_{kesehatan} \times I_{pengetahuan} \times I_{pengeluaran}}$$

Ada dua hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaan indeks indeks ini. Pertama, lebih dari sekedar mengukur pendapatan atau produksi yang dihasilkan suatu daerah, indeks ini mengukur kesejahteraan manusia secara lebih menyeluruh. Kedua, walaupun demikian, indeks ini tidak dengan sendirinya menyajikan gambaran yang utuh. Berbagai indikator pembangunan manusia lainnya masih harus ditambahkan untuk melengkapinya.

Tabel 13. Kriteria Tingkatan Status Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Kriteria	Status Pembangunan Manusia
(1)	(2)
$IPM < 60$	Rendah
$60 < IPM < 70$	Sedang
$70 < IPM < 80$	Tinggi
$IPM > 80$	Sangat Tinggi

Selain itu, IPM dapat digunakan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara/daerah adalah negara/daerah maju, atau terbelakang, serta IPM dapat mengukur pengaruh dari kebijakan ekonomi terhadap kualitas hidup. Indeks ini lebih fokus pada hal-hal yang lebih sensitif dan berguna daripada hanya sekedar pendapatan per kapita yang selama ini digunakan. Indeks ini juga berguna sebagai jembatan bagi peneliti yang serius untuk mengetahui hal-hal yang lebih terinci dalam membuat laporan pembangunan manusianya.

Indeks Pembangunan Manusia sudah merupakan angka standar, sehingga dari IPM suatu wilayah dapat dibandingkan

dengan IPM wilayah/daerah lain. Atau dapat dikatakan, dengan menghitung IPM Kabupaten Pinrang kita bisa mengetahui posisi Kabupaten Pinrang dalam hal pembangunan manusianya diantara daerah-daerah yang lain.

3.4 Gambaran Pencapaian Pembangunan Manusia Kabupaten Pinrang

Berdasarkan teknik penghitungan yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka akan diperoleh komponen pembentuk IPM, sebagai berikut:

Tabel 14. IPM Kabupaten Pinrang dan Komponen, 2020-2023

KOMPONEN	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Umur Harapan Hidup (tahun)	73,94	74,09	74,29	74,47
Harapan Lama Sekolah (tahun)	13,23	13,24	13,25	13,27
Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	7,86	7,87	8,04	8,30
Pengeluaran Riil Per kapita yang Disesuaikan (Ribuan Rupiah)	11.844	11.956	12.102	12.559
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	73,27	73,46	73,90	74,70

Sumber: Berita Resmi Statistik

Pembangunan manusia di Kabupaten Pinrang dari tahun ke tahun menunjukkan perbaikan ke arah yang lebih baik. Hal ini didasarkan pada angka IPM yang terus mengalami kenaikan. Penggunaan perhitungan IPM metode baru ternyata memberikan

dampak terjadinya penurunan dari segi nilai tetapi pada hakikatnya tetap terjadi kenaikan. Setidaknya sejak tahun 2020 hingga tahun 2023 (lihat Gambar 14), IPM Kabupaten Pinrang mengalami kenaikan sebesar 1,43 poin dari tahun 2020 sampai tahun 2023. Peningkatan tersebut merupakan indikasi yang kuat untuk menyatakan bahwa di Kabupaten Pinrang telah terjadi perbaikan pada aspek kesehatan, pendidikan serta ekonomi.

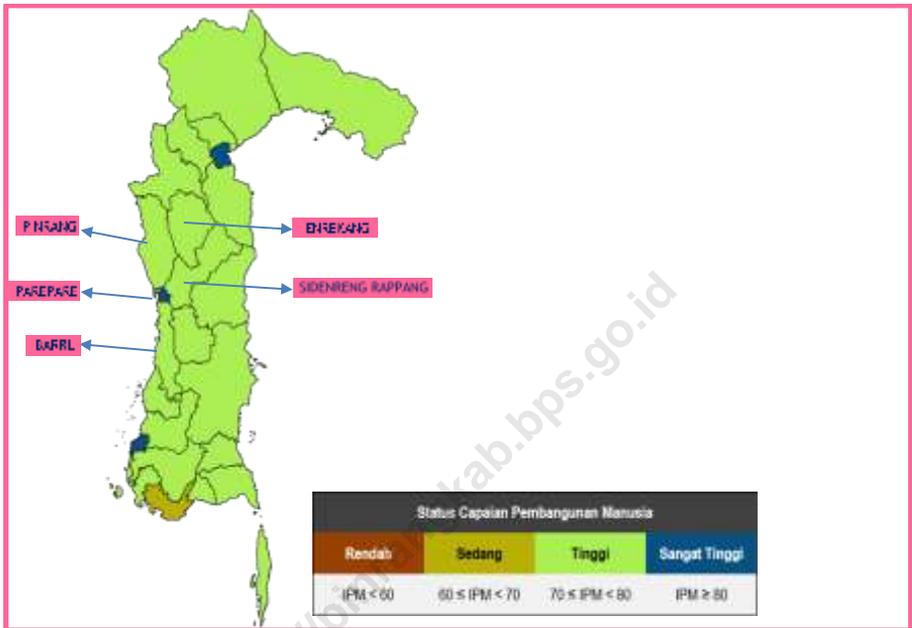


Sumber: Berita Resmi Statistik

Gambar 14. IPM Kabupaten Pinrang 2020-2023

Jika mengacu pada skala internasional, capaian IPM Kabupaten Pinrang dalam kurun waktu empat tahun terakhir termasuk kategori tinggi ($70 < \text{IPM} < 80$). Hal ini terjadi sejak tahun 2020 hingga tahun 2023, IPM Kabupaten Pinrang telah mencapai pada kategori IPM tinggi. Tumbuhnya berbagai pusat bisnis ternyata mampu mempertahankan IPM Kabupaten Pinrang kearah yang lebih

baik, terbukti pada tahun 2023 sudah mencapai 74,70 (kategori tinggi).



Sumber: Berita Resmi Statistik

Gambar 15. IPM Sulawesi Selatan Menurut Kabupaten/Kota dan Status Pembangunan Manusia Tahun 2023

Kabupaten Pinrang termasuk Wilayah Ajatappareng. Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota di wilayah Ajatappareng, Kota Parepare mengalami peningkatan status pembangunan dari “tinggi” menjadi “sangat tinggi” dengan capaian IPM 80,36. Sedangkan Kabupaten Enrekang (75,11), Kabupaten Sidenreng Rappang (74,38), Kabupaten Barru (73,80) status pembangunannya “tinggi”. Meskipun demikian, pertumbuhan IPM Kabupaten Pinrang masih di atas pertumbuhan IPM Kota Parepare (0,61 persen), Kabupaten Enrekang (0,67 persen) dan Kabupaten Sidenreng Rappang (0,77 persen) di

Wilayah Ajatappareng, Selain itu, pertumbuhan IPM Kabupaten Pinrang (1,08 persen) pada tahun 2023 juga di atas pertumbuhan IPM Provinsi Sulawesi Selatan (0,87 persen).



Sumber: Berita Resmi Statistik

Gambar 16. Indeks Pembangunan Manusia dan Pertumbuhannya Kabupaten/ Kota Wilayah Ajatappareng Tahun 2023

Peringkat IPM tertinggi pada tahun 2023 di Provinsi Sulawesi Selatan adalah Kota Makassar, disusul oleh Kota Palopo dan Kota Parepare. Kabupaten Pinrang sendiri berada pada urutan yang baik (peringkat 6 dari 24 kabupaten/kota).

Tabel 15. IPM Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan, Tahun 2023

Kode Prov/ Kab/ Kota	Provinsi/Kab/Kota	Umur Harapan Hidup (tahun)	Harapan Lama Sekolah (tahun)	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	Pengeluaran Riil Perkapita yang disesuaikan (ribuan rupiah)	IPM	Rank IPM*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
7300	Sulawesi Selatan	73,63	13,54	8,76	11.841	74,60	-
7301	Kepulauan Selayar	73,27	12,69	8,35	9.830	71,13	21
7302	Bulukumba	74,01	13,43	8,26	11.392	73,64	9
7303	Bantaeng	72,67	12,53	7,09	12.304	71,28	19
7304	Jeneponto	73,81	12,12	7,00	9.781	68,95	24
7305	Takalar	73,43	12,49	7,66	11.239	71,46	18
7306	Gowa	74,03	13,70	8,41	10.233	73,01	15
7307	Sinjai	72,83	13,26	7,80	10.180	71,20	20
7308	Maros	73,55	13,50	8,03	11.795	73,56	10
7309	Pangkajene Kepulauan	72,87	12,80	8,31	12.241	73,23	13
7310	Barru	72,57	13,62	8,54	11.712	73,80	8
7311	Bone	73,20	13,00	7,54	9.682	70,25	23
7312	Soppeng	73,47	13,21	8,27	10.098	71,94	16
7313	Wajo	73,25	13,31	7,45	13.192	73,56	10
7314	Sidenreng Rappang	74,32	13,02	8,20	12.739	74,38	7
7315	Pinrang	74,47	13,27	8,30	12.559	74,70	6
7316	Enrekang	73,92	13,87	8,94	11.636	75,11	5
7317	Luwu	73,30	13,41	8,73	10.691	73,23	13
7318	Tana Toraja	74,63	13,88	8,60	8.017	71,01	22
7322	Luwu Utara	73,56	12,59	8,14	12.513	73,31	12
7325	Luwu Timur	74,32	13,01	8,93	13.451	75,84	4
7326	Toraja Utara	74,88	13,42	8,51	8.871	71,69	17
7371	Makassar	75,15	15,61	11,56	17.889	84,85	1
7372	Parepare	74,44	14,54	10,70	14.495	80,36	3
7373	Palopo	74,00	15,12	11,13	13.892	80,77	2

Sumber: Badan Pusat Statistik

Data hasil perhitungan IPM yang menunjukkan bahwa Kabupaten Pinrang pada posisi yang relatif baik. Ada dua komponen penyusun IPM Kabupaten Pinrang memiliki angka di atas rata-rata Provinsi Sulawesi Selatan yaitu pengeluaran riil per kapita yang

disesuaikan dan Umur Harapan Hidup. Daya beli di Kabupaten Pinrang menunjukkan bahwa Paritas Daya Beli (PPP) sebesar 12.559 ribu rupiah atau berada diatas PPP Provinsi Sulawesi Selatan yang hanya 11.841 ribu rupiah saja. Demikian juga dengan Umur Harapan Hidup, Kabupaten Pinrang sebesar 74,47 tahun, sedangkan Umur Harapan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 73,63 tahun.

Namun, terdapat komponen penyusun IPM Kabupaten Pinrang yang berada dibawah rata-rata Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu Harapan Lama Sekolah, dan Rata-rata Lama Sekolah. Harapan Lama Sekolah Kabupaten Pinrang sebesar 13,27 tahun. Angka ini di bawah angka Harapan Lama Sekolah Provinsi Sulawesi Selatan yang sebesar 13,54 tahun. Demikian pula yang terjadi pada angka Rata-rata Lama Sekolah untuk Kabupaten Pinrang sebesar 8,30 tahun berada dibawah Rata-rata Lama Sekolah Provinsi Sulawesi Selatan 8,76 tahun.

UHH Kabupaten Pinrang memang lebih tinggi dari UHH Provinsi Sulawesi Selatan, tetapi pemerintah Kabupaten Pinrang tetap harus lebih meningkatkan sarana dan prasarana bidang kesehatan agar kedepannya masyarakat bisa lebih sejahtera dan sehat sehingga memiliki umur yang panjang atau meningkatkan lagi UHH.

Kendati HLS di Kabupaten Pinrang sudah menuju kearah yang positif bukan berarti pemerintah boleh menghentikan pembangunan di bidang pendidikan. Harapan Lama Sekolah merupakan pemicu (*booster*) bagi peningkatan pembangunan manusia dibidang pendidikan. Karena itu diharapkan pemerintah Kabupaten Pinrang

dapat lebih meningkatkan pembangunan sarana prasarana serta kualitas pendidikan.

Yang tak kalah penting adalah mencermati paritas daya beli penduduk di Kabupaten Pinrang yang menunjukkan daya beli cukup tinggi. Kondisi ini tak terlepas dari lokasi yang dekat dengan kota-kota penyangga seperti Kota Parepare maupun Kota Makassar. Akses yang mudah dan budaya secara umum suku-suku di Kabupaten Pinrang yang lebih konsumtif menyebabkan paritas daya beli yang tinggi. Mencermati kondisi seperti itu, maka pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Pinrang hendaknya masih harus diupayakan sedemikian rupa sehingga mengalami pertumbuhan yang relatif lebih tinggi dan lebih merata, yaitu dapat dinikmati oleh seluruh penduduk di Kabupaten Pinrang.

Peringkat tertinggi nomor enam dalam pembangunan manusia di Provinsi Sulawesi Selatan menjadikan pemerintah Kabupaten Pinrang hendaknya tetap mawas diri dan tetap terus melakukan upaya-upaya pembangunan yang pro-rakyat yaitu dengan lebih meningkatkan kualitas pembangunan agar dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat, terutama di bidang pendidikan. Sehingga, kedepannya pembangunan manusia di Kabupaten Pinrang semakin baik yang ditunjukkan oleh terus meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia sebagai salah satu indikator keberhasilan pembangunan di kabupaten ini. Bukan tidak mungkin suatu saat nanti jika berbagai indikator sudah terpenuhi Kabupaten Pinrang bisa bertransformasi menjadi sebuah kota.



Sumber: Badan Pusat Statistik

Gambar 17. Tren dan Pertumbuhan IPM Pinrang, 2020-2023

Pertumbuhan IPM merupakan salah satu cara untuk melihat perkembangan pembangunan manusia di suatu wilayah. Secara tren pada tahun 2021, IPM tumbuh sebesar 0,26 persen dibandingkan tahun 2020. Kemudian pada 2 tahun berikutnya, laju pertumbuhan IPM juga terlihat lebih cepat dibandingkan tahun sebelumnya. Dengan semakin cepatnya pertumbuhan IPM, maka semakin cepat pula waktu yang dibutuhkan Kabupaten Pinrang untuk mencapai level pembangunan manusia yang lebih tinggi.



Daftar Istilah Statistik

Definisi Istilah-Istilah Statistik

Umur Harapan Hidup pada Waktu Lahir

Perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur.

Akses terhadap fasilitas kesehatan

Persentase rumah tangga yang tinggal pada jarak kurang dari 5 kilometer dari fasilitas kesehatan (rumah sakit, klinik, puskesmas, dokter, juru rawat, bidan yang terlatih, paramedik dan sebagainya).

Angka Morbiditas

Proporsi dari keseluruhan penduduk yang menderita akibat masalah kesehatan hingga mengganggu aktivitas sehari-hari selama satu bulan terakhir.

Angka Melek Huruf (dewasa)

Proporsi penduduk berumur 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis dalam huruf Latin atau lainnya.

Angka Buta Huruf (dewasa)

Proporsi penduduk berumur 15 tahun ke atas yang tidak dapat membaca dan menulis dalam huruf Latin atau lainnya. Dihitung dengan cara 100 dikurangi dengan angka melek huruf (dewasa).

Angka Partisipasi Sekolah

Proporsi dari keseluruhan penduduk dari berbagai kelompok umur tertentu (7-12; 13-15; 16-18; dan 19-24) yang masih duduk di bangku sekolah.

Dapat membaca dan menulis

Dapat membaca dan menulis kata-kata/kalimat sederhana dalam aksara tertentu.

Paritas daya beli [*Purchasing Power Parity/ PPP*]

PPP memungkinkan dilakukannya perbandingan harga-harga riil antar provinsi dan antar kabupaten, mengingat nilai tukar yang biasa digunakan dapat menurunkan atau menaikkan nilai daya beli yang terukur dari konsumsi per kapita yang telah disesuaikan. Dalam konteks PPP untuk Indonesia, satu rupiah di suatu provinsi memiliki daya beli yang sama dengan satu rupiah di Provinsi Jakarta. PPP dihitung berdasarkan pengeluaran riil per kapita setelah disesuaikan dengan indeks harga konsumen dan penurunan utilitas marginal yang dihitung dengan rumus Atkinson.

Konsumsi Total

Konsumsi barang-barang dan jasa-jasa dengan mengabaikan asal barang dan jasa tersebut. Konsumsi total juga mencakup pemberian dan barang/jasa yang diproduksi sendiri oleh rumah tangga yang bersangkutan. Dalam laporan ini, konsumsi total merujuk pada konsumsi bulanan.

Pengeluaran untuk Makanan

Proporsi pengeluaran yang dipergunakan untuk mengkonsumsi makanan dibandingkan dengan total pengeluaran (makanan dan bukan makanan).

Rata-rata lama sekolah (*Mean Years of Schooling*)

Rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berumur 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani.

Indeks Kesehatan

Salah satu dari tiga komponen indeks pembangunan manusia. Nilai indeks ini berkisar antara 0 - 100.

Indeks Pendidikan

Salah satu dari tiga komponen indeks pembangunan manusia. Indeks ini didasarkan pada kombinasi antara harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Nilai indeks tersebut berkisar antara 0 hingga 100.

Indeks Pengeluaran

Salah satu dari tiga komponen indeks pembangunan manusia yang didasarkan pada paritas daya beli (PPP) disesuaikan dengan rumus Atkinson. Nilai indeks berkisar antara 0 - 100.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks komposit yang disusun dari tiga indikator: lama hidup yang diukur dengan umur harapan hidup ketika lahir; pendidikan yang diukur berdasarkan rata-rata lama sekolah dan harapan lama

sekolah dan standar hidup yang diukur dengan pengeluaran per kapita disesuaikan (PPP rupiah). Nilai indeks berkisar antara 0-100.

Imunisasi

Memasukkan kuman penyakit yang sudah dilemahkan kedalam tubuh dengan suntik atau telan dengan maksud agar terjadi kekebalan terhadap jenis penyakit tertentu pada tubuh.

Tidak/belum pernah sekolah

Tidak atau belum pernah bersekolah di sekolah formal, misalnya tamat/belum tamat Taman Kanak Kanak tetapi tidak melanjutkan ke SD.

Masih bersekolah

Sedang mengikuti pendidikan menengah, atau tinggi baik pada jenjang dasar pendidikan.

Tidak sekolah lagi

Pernah mengikuti pendidikan dasar, menengah atau tinggi, tetapi pada saat pencacahan tidak bersekolah lagi.

Tamat sekolah

Menyelesaikan pelajaran pada kelas atau tingkat terakhir suatu jenjang sekolah di sekolah negeri maupun swasta dengan mendapatkan tanda tamat/ijazah. Orang yang belum mengikuti pelajaran pada kelas tertinggi tetapi telah mengikuti ujian dan lulus dianggap tamat sekolah.

Medis Operasi Perempuan (MOW/sterilisasi perempuan/tubektomi)

Operasi yang dilakukan pada perempuan untuk mencegah terjadinya kehamilan, yaitu mengikat saluran telur agar perempuan itu tidak dapat mempunyai anak lagi. Operasi untuk mengambil Rahim atau indung telur kadang-kadang dilakukan karena alasan-alasan lain, dan bukan untuk memberikan perlindungan agar perempuan tidak mempunyai anak lagi. Yang dicatat sebagai sterilisasi di sini hanya operasi yang ditujukan agar seorang perempuan tidak bisa mempunyai anak lagi.

Medis Operasi Pria (MOP/sterilisasi Pria/Vasektomi)

Suatu operasi ringan yang dilakukan pada pria dengan maksud untuk mencegah terjadinya kehamilan pada pasangannya. IUD/Spiral Alat yang dibuat dari plastik halus/tembaga, berukuran kecil, berbentuk spiral, T, kipas dan lainnya, dipasang di dalam rahim untuk mencegah terjadinya kehamilan.

Suntikan KB

Salah satu pencegahan kehamilan dengan jalan menyuntikkan cairan tertentu kedalam tubuh, misalnya satu, tiga atau enam bulan sekali. Cara ini disebut juga depo provera.

Pil KB

Pil yang ditelan untuk mencegah terjadinya kehamilan. Pil ini harus ditelan secara teratur setiap hari. Orang dikatakan sedang

menggunakan pil KB, apabila sejak haid terakhir dia menelan pil KB setiap hari.

Kondom/karet KB

Alat yang terbuat dari karet, berbentuk seperti balon, yang dipakai oleh laki-laki selama bersenggama dengan maksud agar istrinya/pasangannya tidak menjadi hamil. Orang dikatakan sedang menggunakan kondom apabila sejak haid terakhir pasangannya selalu menggunakan kondom waktu berkumpul, termasuk saat kumpul terakhir.

Norplant/implant/susuk KB

Enam batang logam kecil yang dimasukkan ke bawah kulit lengan atas untuk mencegah terjadinya kehamilan. Orang dikatakan menggunakan susuk KB apabila susuk KB terakhir dipasang di tubuhnya kurang dari 5 (lima) tahun sebelum pencacahan.

KB Lainnya

Antara lain intravag yakni tissue KB yang dimasukkan ke dalam vagina sebelum kumpul.

Alat/cara tradisional

Antara lain pantang berkala/sistim kalender, senggama terputus, tidak campur, jamu, dan urut.



Daftar Pustaka

Badan Pusat Statistik. 2024. Kabupaten Pinrang Dalam Angka 2023. Pinrang.

Badan Pusat Statistik. 2023. Indeks Pembangunan Manusia 2023. Jakarta.

Badan Pusat Statistik. 2023. Indek Pembangunan Manusia Kabupaten Pinrang 2022. Pinrang.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Pinrang. 2023. Statistik Kesejahteraan Rakyat BPS Kabupaten Pinrang 2022. Pinrang.

Meneg PP dan BPS. 2008. Pembangunan Manusia Berbasis Gender Tahun 2007. Jakarta.

United Nations Development Programme. 1993. Human Development Report. New York. UNDP.

-----, 2009. Human Development Report. New York. UNDP.

-----, 2010. Human Development Report. New York. UNDP.

-----, 2011. Human Development Report. New York. UNDP.

Daftar Lampiran

Lampiran 1. *Relative Standard Error (RSE)* Angka Partisipasi Sekolah (APS) dan Angka Partisipasi Murni (APM) Penduduk menurut Karakteristik dan Jenis Kelamin, 2023

Karakteristik	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
APS			
7 - 12 tahun	0,73	0,00	0,38
13 - 15 tahun	5,47	3,67	3,17
16 - 18 tahun	8,48	11,04	6,99
19 - 23 tahun	22,40	20,51	15,63
APM			
SD	0,73	0,22	0,39
SMP	10,07	9,58	6,90
SMA	12,64	11,18	8,52
PT	22,82	21,25	16,06

Catatan: ¹Jika RSE >25% tetapi ≤50%, estimasi harus digunakan dengan hati-hati

²Jika RSE >50%, estimasi dianggap tidak akurat

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret

Lampiran 2. *Relative Standard Error (RSE)* Angka Morbiditas menurut Karakteristik, 2023

Karakteristik	Morbiditas
(1)	(2)
Jenis Kelamin	
Laki-laki	12,15
Perempuan	9,70
Kabupaten Pinrang	9,19

Catatan: ¹Jika RSE >25% tetapi ≤50%, estimasi harus digunakan dengan hati-hati

²Jika RSE >50%, estimasi dianggap tidak akurat

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret

Lampiran 3. *Relative Standard Error (RSE)* Persentase Rumah Tangga menurut Karakteristik dan Sumber Air Utama yang Digunakan Rumah Tangga untuk Mandi/Cuci/Dll, 2023

Kabupaten	Air Kemasan Bermerk/ Air Isi Ulang	Leding	Sumur Bor/Pompa	Sumur Terlindung/ Sumur Tak Terlindung	Mata Air Terlindung/ Mata Air Tak Terlindung	Lainnya ¹
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Pinrang	76,64 ²	29,54 ¹	3,66	9,18	23,7	16,23

Catatan: ¹Jika RSE >25% tetapi ≤50%, estimasi harus digunakan dengan hati-hati

²Jika RSE >50%, estimasi dianggap tidak akurat

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret

Lampiran 4. *Relative Standard Error (RSE)* Persentase Rumah Tangga menurut Karakteristik dan Tempat Pembuangan Akhir Tinja, 2023

Kabupaten	Tempat Pembuangan Akhir Tinja	
	Tangki Septi/IPAL	Lainnya
(1)	(2)	(3)
Pinrang	0,40	57,18²

Catatan: ¹Jika RSE >25% tetapi ≤50%, estimasi harus digunakan dengan hati-hati

²Jika RSE >50%, estimasi dianggap tidak akurat

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret

ST 2023

SENSUS PERTANIAN

BerAKHLAK

BERAKHLAK MELAYANI BANGSA

**# bangga
melayani
bangsa**

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN PINRANG**

Jl. Andi Isa No 18, Pinrang, 91211

Telp/Fax : (0421) 921021

Email : bps7315@bps.go.id

Homepage : pinrangkab.bps.go.id

ISSN 2797-2798



9

772797

279006